

**SKRIPSI**

**ANALISIS KETERSEDIAAN PRASARANA PERSAMPAHAN DI  
KELURAHAN BENAI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI PROVINSI RIAU**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh*

*Gelar Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota*

*Strata Satu (S1)*



Oleh:

**TRIWIDIA NINGSIH**

**NPM. 160205022**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI**

**TELUK KUANTAN**

**2021**

**SKRIPSI**

**ANALISIS KETERSEDIAAN PRASARANA PERSAMPAHAN DI  
KELURAHAN BENAI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI PROVINSI RIAU**



Oleh:

**TRIWIDIA NINGSIH**  
**NPM. 160205022**

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN**

**2021**

## PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan nilai akademik (Strata Satu), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun Sekolah Tinggi atau Universitas lainnya.
2. Karya tulis ini adalah penelitian saya sendiri dan dibantu oleh dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali secara tertulis dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat pertimbangan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Teluk Kuantan, 25 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan



**TRIWIDIA NINGSIH**  
**NPM. 160205022**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Judul: : ANALISIS KETERSEDIAAN PRASARANA  
PERSAMPAHAN DI KELURAHAN BENAI  
KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI PROVINSI RIAU.

Nama : TRIWIDIA NINGSIH

Npm : 160205022

Program Studi : PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

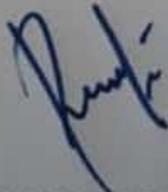
Jenjang : STRATA SATU (S1)

Tahun : 2021/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk disajikan dalam sidang/ujian skripsi pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota jenjang Sarjana Fakultas Teknik Universitas Islam Kuantan Singingi.

Teluk Kuantan, 27 Agustus 2021

**PEMBIMBING I**



**Rikki Afrizal, SPd., M.Sc**

**NIDN. 1022128603**

**PEMBIMBING II**



**Retni Pratiwi, SE., MM**

**NIDN. 1023018902**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul: : ANALISIS KETERSEDIAAN PRASARANA  
PERSAMPAHAN DI KELURAHAN BENAI KECAMATAN  
BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI  
RIAU.

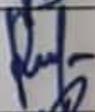
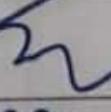
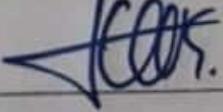
Nama : TRIWIDIA NINGSIH

Npm : 160205022

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan didepan Dewan Penguji pada sidang skripsi tanggal 27 Agustus 2021. Menurut pandangan kami, skripsi ini telah memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan Gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota (S.PWK)

Teluk Kuantan, 30 Agustus 2021

Disahkan Oleh Dewan Penguji :

Jabatan Dalam Seminar	Nama Dewan Seminar	Tanda Tangan
Ketua Sidang	Gusmulyani, S.T., M.T	
Pembimbing I	Rikki Afrizal, S.Pd., M.Sc	
Pembimbing II	Retni Pratiwi, SE., MM	
Penguji I	Riki Ruspianda, SP., M.Si	
Penguji II	Agus Candra, S.T., M.Si	

Dekan  
Fakultas Teknik



Gusmulyani, S.T., M.T  
NIDN. 0007107301

Ketua  
Program Studi  
Perencanaan Wilayah dan Kota



Agus Candra, S.T., M.Si  
NIDN. 1020088701

**ANALISIS KETERSEDIAAN PRASARANA PERSAMPAHAN DI  
KELURAHAN BENAI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN**

**SINGINGI**

**ABSTRAK**

**TRIWIDIA NINGSIH**

**160205022**

Ketersediaan prasarana persampahan masalah utama di Kelurahan Benai. Permasalahan sampah timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah dengan pengelolaannya dan ketersediaan prasarana persampahan serta semakin menurunnya daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Pengelolaan persampahan belum dilaksanakan secara optimal, kurangnya ketersediaan prasarana persampahan di Kelurahan Benai, selain itu alat pengangkutan yang kurang memadai dan sering kali tidak tepat waktu dalam mengangkut sampah ke TPA.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketersediaan prasarana persampahan (Pewadahan, Pengumpulan, Pengangkutan) dan juga untuk mengetahui bagaimana pengelolaan persampahan dalam aspek kelembagaan, aspek retribusi dan aspek hukum/peraturan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dan deskriptif. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan ketentuan SNI 19-2454-2002 dan SNI 3243-2008.

Hasil penelitian ini adalah ketersediaan prasarana persampahan dalam bentuk pewadahan sampah dan pengumpulan sampah tidak memadai akibatnya masyarakat lebih memilih mengelola sendiri sampahnya. Ketersediaan prasarana persampahan dalam bentuk pengangkutan yaitu armada pengangkutan sampah menggunakan *container* yang dijadwalkan 1-2 kali seminggu namun sering terjadi keterlambatan sampah yang mengakibatkan sampah menumpuk dan berserakan. Pengelolaan persampahan dalam aspek kelembagaan yaitu kurangnya perhatian pemerintah dalam menindaklanjuti permasalahan sampah di Kelurahan Benai. Retribusi yang tidak berjalan dikarenakan masyarakat tidak mau membayar iuran kebersihan karena merasa tidak adanya pelayanan pengelolaan persampahan. Permasalahan yang timbul tersebut Belum ada hukum/peraturan undang-undang yang membahas mengenai pengelolaan persampahan khusus untuk kabupaten kuantan singingi.

**Kata Kunci: Analisis, Ketersediaan, Prasarana, Sampah, Pengelolaan Sampah**

**ANALYSIS OF THE AVAILABILITY OF INFRASTRUCTURE IN BENAI  
VILLAGE BENAI DISTRICT OF KUANTAN SINGINGI**

**ABSTRACT**

**TRIWIDIA NINGSIH**

**160205022**

*The availability of infrastructure is a major problem in Benai Village. The problem of waste arises due to the imbalance of waste production with its management and availability of infrastructure and the decrease in the carrying capacity of nature as a landfill. The management of the exposure has not been implemented optimally, the lack of availability of infrastructure in Benai Village, in addition to inadequate and often not on time in transporting waste to landfill.*

*The purpose of this research is to find out how the availability of infrastructure and also to find out how to manage the land in institutional aspects, aspects of retribution and legal/regulatory aspects. The research method used is qualitative and descriptive analysis. The analysis used is qualitative descriptive analysis with the provisions SNI 19-2454-2002 and SNI 3243-2008.*

*The result of this study is the availability of infrastructure in the form of waste waste and inadequate garbage collection as a result of which the community prefers to manage their own waste. The availability of infrastructure in the form of transportation is a garbage transport fleet using containers scheduled 1-2 times a week but there is often a delay in garbage that causes garbage to accumulate and scatter. The management of the exposure in the institutional aspect is the lack of government attention in following up on the problem of waste in Benai Village. The levy that does not work because the community does not want to pay cleanliness dues because they feel the absence of exposing management services. The problem that arises there is no law / regulation that discusses the management of special sings for kuantan singingi districts.*

***Keywords: Analysis, Availability, Infrastructure, Garbage, Waste Management***

## KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS KETERSEDIAAN PRASARANA PERSAMPAHAN KELURAHAN BENAI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan ketersediaan prasarana persampahan yang ada di Kelurahan Benai. Dalam kesempatan ini penyusun tidak lupa menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang memberikan bantuan serta dorongan, terutama kepada:

1. Ibu Ir. Hj.Elfi Indrawanis, M.M selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Ibu Gusmulyani, ST.,MT selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Kuantan Singingi
3. Bapak Agus Candra, ST.,M.Si selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
4. Bapak Rikki Afrizal, S.Pd, M.Sc selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya mulai dari awal hingga akhir sehingga saya bisa menyelesaikan Proposal Skripsi ini.
5. Ibu Retni Pratiwi, SE.,MM. selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada saya mulai dari awal hingga akhir sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota
7. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan banggakan, terimakasih untuk segala yang sudah di berikan sampai pada titik ini.
8. Dan juga rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2016

Kami menyadari sepenuhnya keterbatasan dan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan laporan skripsi ini. Semoga laporan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan semua pihak yang membaca. Demikian sedikit pemaparan dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terimakasih.

Teluk Kuantan, 6 Juli 2021

Penulis

**TRIWIDIA NINGSIH**  
NPM.160205022

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Batasan Masalah.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.6.1 Ruang Lingkup Materi.....	7
1.6.2 Ruang Lingkup Wilayah.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pengertian Analisis.....	8
2.2 Prasarana Wilayah dan Kota.....	8
2.3 Ketersediaan Prasarana.....	9
2.4 Prasarana Persampahan.....	11
2.5 Persampahan.....	14
2.4.1 Pengertian Sampah.....	14
2.4.2 Jenis dan Sumber Sampah.....	15
2.4.3 Timbulan Sampah.....	16
2.3.4 Karakteristik Sampah.....	17
2.6 Teori Pengelolaan Sampah.....	18
2.5.1 Aspek Teknik Operasional Persampahan.....	19
2.5.2 Aspek Kelembagaan.....	23
3.5.3 Aspek Pembiayaan.....	23
2.5.4 Aspek Hukum dan Peraturan.....	25
2.7 Penelitian Terdahulu.....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi Penelitian.....	30
3.2 Waktu Penelitian.....	30
3.3 Metode Penelitian.....	30
3.4 Sumber dan Jenis Data.....	31
3.3.1 Data Primer.....	31

3.3.2 Data Sekunder .....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.4.1 Observasi .....	32
3.4.2 Wawancara .....	32
3.4.3 Dokumentasi .....	34
3.4.4 Studi Pustaka .....	34
3.6 Variabel Penelitian.....	34
3.7 Teknik Analisis Data .....	35
3.8 Kerangka Pikir Penelitian .....	37
3.9 Kerangka Alur Penelitian .....	38
3.10 Rencana Jadwal Penelitian .....	39

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Benai .....	40
4.1.1 Administrasi Wilayah.....	40
4.1.2 Kondisi Geografis .....	40
4.1.3 Pemerintahan.....	41
4.1.4 Kependudukan .....	41
4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian .....	45
4.2.1 Produksi Sampah di Kelurahan Benai.....	45
4.2.2 Ketersediaan Prasarana Persampahan .....	48
4.2.3 Pengelolaan Persampahan .....	58

#### **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran .....	73

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Aturan-aturan Teknis Penyediaan Sistem Persampahan .....	13
Tabel 2.2	: Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Klasifikasi Kota.....	16
Tabel 2.3	: Contoh wadah dan penggunaanya.....	20
Tabel 2.4	: Karakteristik wadah sampah.....	20
Tabel 2.5	: Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 3.1	: Informan Kunci dari Instansi Terkait .....	33
Tabel 3.2	: Variabel penelitian .....	35
Tabel 3.3	: Rencana Jadwal Penelitian .....	38
Tabel 4.1	: Luas Wilayah Kecamatan Menurut Desa atau Kelurahan Tahun 2018.....	49
Tabel 4.2	: Desa/Kelurahan Menurut Status Pemerintahan Di Kecamatan Benai .....	40
Tabel 4.3	: Penduduk Kecamatan Benai .....	41
Tabel 4.4	: Jumlah Penduduk Menurut Desa atau Kelurahan Di Kecamatan Benai .....	41
Tabel 4.5	: Kepadatan Penduduk Menurut Desa atau Kelurahan Di Kecamatan Benai .....	41
Tabel 4.6	: Produksi Sampah di Kelurahan Benai.....	45
Tabel 4.7	: Tarif Retribusi Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2012 .....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Pikir Penelitian .....	36
Gambar 3.2	Kerangka Alur Penelitian.....	37
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kecamatan Benai .....	43
Gambar 4.2	Peta Kelurahan Benai .....	44
Gambar 4.3	Tong Sampah di Kelurahan Benai.....	49
Gambar 4.4	Bak Sampah Bak sampah (Pasangan Batu Bata) .....	52
Gambar 4.5	Kantong Plastik .....	52
Gambar 4.6	Lahan yang dijadikan tempat pembuangan sampah RT 001 – RW 001.....	53
Gambar 4.7	Lahan yang dijadikan tempat pembuangan sampah RT 003 – RW 002.....	53
Gambar 4.8	Lahan yang dijadikan tempat pembuangan sampah RT 006 – RW 002 .....	53
Gambar 4.9	Armada Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA .....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk kota yang tinggi serta meningkatnya kegiatan pembangunan di berbagai sektor menimbulkan berbagai masalah di wilayah-wilayah perkotaan yang antara lain urbanisasi, permukiman kumuh, persampahan, dan sebagainya. Permasalahan yang dialami hampir diseluruh kota di Indonesia adalah Persampahan. Persampahan merupakan masalah yang tidak dapat diabaikan, karena di dalam semua aspek kehidupan selalu menghasilkan sampah, disamping produk utama yang diperlukan sampah akan terus bertambah seiring dengan banyaknya aktivitas manusia yang disertai semakin besarnya jumlah penduduk di Indonesia (Syahriar Tato 2015).

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengolahan sampah, dijelaskan bahwa sampah merupakan permasalahan nasional sehingga pengolahannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah prilaku masyarakat.

Sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat mengganggu estetika lingkungan, menimbulkan bau, serta mengakibatkan berkembangnya penyakit. Permasalahan persampahan dapat disebabkan dari sumber sampah, dimana penghasil sampah tidak melakukan penanganan dengan baik. Selain itu, penghasil sampah tidak mau menyediakan prasarana sampah dirumah masing-masing, dan lebih suka membuang sampah dengan seenaknya kesaluran air atau membakarnya sehingga mencemari lingkungan sekitarnya. Permasalahan sampah timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah dengan pengelolaannya dan ketersediaan prasarana persampahan serta

semakin menurunnya daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah (Syahriar Tato 2015).

Persoalan sampah sangat berkaitan dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Olehnya penanggulangan sampah bukan hanya urusan pemerintah semata akan tetapi penanganannya membutuhkan keterlibatan atau partisipasi masyarakat secara luas. Dalam penanganan sampah dapat diasumsikan bahwa laju produksi sampah tidak seimbang dengan proses penanganannya, hal tersebut tentu memacu pemerintah daerah untuk lebih awal memikirkan bagaimana strategi yang efisien dalam menanggulangi masalah persampahan. Masalah persampahan terjadi antara lain karena semrawutnya pola permukiman dan pesatnya pertambahan jumlah penduduk. Maka salah satu aspek yang sedang diupayakan adalah prasarana yang memadai sebagai media utama untuk pengelolaan persampahan (Joflius Dobiki, 2018).

Prasarana salah satu fasilitas utama atau fasilitas dasar dalam suatu kegiatan dalam permukiman. Prasarana adalah semua peralatan dan bangunan penunjangnya yang berfungsi dalam pengelolaan sampah mulai dari sumber timbulan sampah sampai pengolahan akhir. Fungsi utama prasarana dasar permukiman yang salah satunya prasarana persampahan yaitu untuk menciptakan kenyamanan, menciptakan kepuasan, mempercepat dan mempermudah proses kerja, memudahkan kebutuhan dan aktivitas masyarakat sehari-hari (SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan).

Pertumbuhan dan perkembangan suatu kota yang cukup pesat menuntut adanya penyediaan sarana dan prasarana kota yang semakin baik dan memadai. Salah satu penyediaan sarana dan prasarana perkotaan diwujudkan dengan adanya pengelolaan persampahan suatu kota, pengelolaan persampahan ditujukan untuk menanggulangi dan mencegah pencemaran lingkungan baik yang ditimbulkan oleh sampah domestik

maupun komersil, sehingga pengelolaan dan penyediaan prasarana secara optimal akan dapat menciptakan lingkungan hidup perkotaan yang sehat dan nyaman (Nurwahdaniar M DG Masikki, 2013).

Kelurahan Benai adalah salah satu desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Benai, sebagai kelurahan yang sedang tumbuh dan juga dihadapkan dengan permasalahan persampahan yang tentunya berkaitan dengan keasrian dan keindahan serta kebersihan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi jumlah penduduk Kelurahan Benai tahun 2015 sebanyak 1.475 jiwa dan meningkat menjadi 1.553 jiwa pada tahun 2019. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya tentunya harus sebanding dengan peningkatan jumlah sarana dan prasarana kota. Permasalahan persampahan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Benai. Hal ini dikarenakan Kelurahan Benai merupakan pusat ibu kota Kecamatan Benai yang memiliki tingkat kepadatan penduduk mencapai 439,71 jiwa/km<sup>2</sup> dengan luas wilayah 3,50 km<sup>2</sup> yang relatif tinggi dan juga sebagai pusat perekonomian dalam perdagangan, pelayanan jasa, pusat pendidikan dan pusat perkantoran sangat sulit untuk menanggulangi masalah sampah (BPS Kabupaten Kuantan Singingi, 2020).

Menurut Kabid Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Limbah B3 di Kelurahan Benai belum berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan kurangnya pengelolaan persampahan belum dilaksanakan secara optimal, karena fokus perhatian pengelolaan ditujukan di ibukota Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, kurangnya penyediaan prasarana persampahan yang ada. Sumber sampah di Kelurahan Benai di dominasi oleh sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, fasilitas umum, penyapuan jalan, dan lain-lain. Selain itu terkait dengan alat pengangkutan yang kurang memadai sebagai salah satu faktor tidak terlayannya pengangkutan sampah tersebut. Pengangkutan di Kelurahan Benai dilakukan dalam 2

kali dalam seminggu. Para pendatang seperti pedagang yang masuk ke Kelurahan Benai menambah debit timbulan sampah dan tidak diimbangi dengan bertambahnya prasarana penampungan sementara atau bisa disebut *kontainer*, serta sistem pengangkutan yang tidak tepat waktu. Selain itu, tidak tersedianya prasarana persampahan menyebabkan bau busuk, serta bakteri penyakit yang tentu saja dapat membahayakan kesehatan masyarakat sekitar.

Dalam operasional persampahan berkaitan dengan kebutuhan akan prasarana yang memadai antara lain pewadahan, pengumpulan, pemindahan, dan pengangkutan. Khususnya Kelurahan Benai yang akhir-akhir ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat ditandai mulai munculnya permukiman yang semakin padat, membuat perubahan gaya hidup masyarakat, perubahan tata guna lahan. Pertumbuhan penduduk karena migrasi dari daerah lain ke Kelurahan Benai serta dampak-dampak lain. Hal-hal tersebut tentu saja mempengaruhi adanya pertambahan timbulan sampah yang dihasilkan baik sampah domestik maupun sampah komersil.

Jumlah timbulan sampah di Kelurahan Benai dari tahun 2015 ke tahun 2019 semakin meningkat. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup jumlah sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, fasilitas umum, penyapuan jalan, dan lain-lain di Kelurahan Benai pada tahun 2015 sebanyak 3.687,5 lt/hari dan meningkat pada tahun 2019 sebanyak 3.882,5 lt/hari. Kemampuan prasarana angkutan yang terbatas dan frekuensi pengangkutan sampah menyebabkan sampah yang tidak terangkut ke TPA akan berserakan di TPS, saluran air, serta lahan-lahan kosong ataupun dibakar (Kabid Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Limbah B3. Dinas Lingkungan Hidup, 2020).

Ketersediaan prasarana persampahan dalam rangka pengelolaan kebersihan dan persampahan merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki. Mengingat pengelolaan

kebersihan dan persampahan merupakan suatu proses manajemen yang harus direncanakan, dilaksanakan dan dikontrol dengan baik, maka prasarana sangat menunjang kinerja pengelolaan persampahan. Dinas Lingkungan Hidup sebagai penanggung jawab akan masalah kebersihan, dimana alat angkut atau armada yang dimiliki sudah cukup tetapi belum dapat mengelola pengelolaan persampahan berupa pewadahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah di luar ibukota kabupaten secara optimal. Untuk itu, penelitian ini penting karena masalah ketersediaan prasarana persampahan sangat menunjang fungsi dan tugas pengelolaan kebersihan dan persampahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan Benai.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketersediaan prasarana (pewadahan, pengumpulan, pengangkutan) persampahan Kelurahan Benai Kecamatan Benai?
2. Bagaimana pengelolaan persampahan dalam aspek kelembagaan, aspek retribusi, dan aspek pengaturan di Kelurahan Benai Kecamatan Benai?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketersediaan prasarana (pewadahan, pengumpulan, pengangkutan) persampahan Kelurahan Benai Kecamatan Benai!

2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan persampahan dalam aspek kelembagaan, aspek retribusi, dan aspek pengaturan Kelurahan Benai Kecamatan Benai!

#### **1.4 Batasan Masalah**

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas gambaran permasalahan yang begitu luas. Namun peneliti menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Permasalahan yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya mengenai analisis ketersediaan prasarana persampahan di Kecamatan Benai Kabupaten Benai Provinsi Riau.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penselitian yang penulis lakukan ini dapat bermanfaat bagi penulis/peneliti sendiri maupun bagi para pembaca atau pihak-pihak lain yang berkepentingan:

1. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam analisis ketersediaan prasarana persampahan Kelurahan Benai Kecamatan Benai.

2. Bagi Akademi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan koleksi serta referensi yang dapat digunakan sebagai tinjauan pustaka bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah Setempat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi rekomendasi terhadap analisis ketersediaan prasarana persampahan Kelurahan Benai Kecamatan Benai.

## **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.6.1 Ruang Lingkup Materi**

Dengan adanya keterbatasan kebutuhan waktu, biaya, dan tenaga. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka ruang lingkup materi penelitian di batasi pada kajian yaitu analisis ketersediaan prasarana persampahan di Kecamatan Benai Kabupaten Benai Provinsi Riau.

### **1.6.2 Ruang Lingkup Wilayah Studi**

Ruang lingkup wilayah studi penelitian yang di bahas yaitu wilayah di Kelurahan Benai Kecamatan Benai.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Analisis**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) menjelaskan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Sugiyono, 2015:335 mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk permasalahannya. (Satori dan Khomariyah, 2014:200)

#### **2.2 Prasarana Wilayah dan Kota**

Menurut Maryati dan Deliyanto tahun 2013 dalam buku Prasarana Wilayah dan Kota infrastruktur merupakan elemen penting dalam suatu wilayah dan kota. Semua aspek kehidupan manusia membutuhkan infrastruktur. Mengingat pentingnya infrastruktur bagi keberlangsungan suatu wilayah dan kota, diperlukan pengetahuan yang cukup baik terkait dengan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur.

Infrastruktur atau prasarana merupakan istilah yang mengacu pada *social overhead capital* yang mempunyai karakteristik sosial dan karakteristik ekonomi. Infrastruktur mempunyai peran yang sangat penting, baik dari segi ekonomi, sosial, fisik, maupun lingkungan. Proses perencanaan infrastruktur merupakan suatu proses

yang kompleks, yang terdiri dari perkiraan kebutuhan, indentifikasi ketersediaan, keseimbangan permintaan dan ketersediaan, pemilihan sistem, desain, penarifan, dan kelembagaan.

Kebutuhan infrastruktur merupakan komponen penting dalam sistem infrastruktur. Oleh karena itu, perkiraan kebutuhan infrastruktur harus dilakukan secara baik. Selain itu, komponen penting lainnya yang harus diperhatikan dalam infrastruktur adalah ketersediaan infrastruktur. Kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur haruslah seimbang, jika tidak akan timbul berbagai masalah.

Perkembangan penduduk yang pesat pada umumnya tidak dapat diikuti oleh penyediaan infrastruktur, khususnya infrastruktur yang berbasis sumber daya, seperti air bersih dan energi. Oleh karena itu, disamping aspek perencanaan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur diperlukan juga aspek pengelolaan infrastruktur.

### **2.3 Ketersediaan Prasarana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata ketersediaan adalah kesiapan suatu sarana (tenaga, barang, modal, dan anggaran) untuk dapat digunakan atau dioperasikan dalam waktu yang telah ditentukan. Arti lainnya dari ketersediaan adalah keadaan tersedia.

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (*spatial space*) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi sebagaimana mestinya. Infrastruktur metujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, *drainase*, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg,1988 dalam Kodoatie,2005:8).

Dalam SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, dikenal adanya istilah prasarana lingkungan. Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, lebih jelasnya prasarana lingkungan atau sarana yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman adalah jaringan jalan untuk mobilitas orang dan angkutan barang, mencegah perambatan kebakaran serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur, jaringan air bersih, jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan, serta jaringan saluran air hujan untuk pematusan (*drainase*) dan pencegahan banjir setempat.

Dari pengertian tersebut dapat disederhanakan bahwa prasarana merupakan kerangka dasar dari suatu sistem, kerangka dasar tersebut menjadi fasilitas umum dan pelengkapan dasar fisik yang memungkinkan lingkungan untuk berfungsi sebagaimana mestinya, serta menjadi penentu keberhasilan dari suatu perkembangan kota.

Fungsi prasarana adalah untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan permukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya, upaya memperbaiki lingkungan membutuhkan keseimbangan antar tingkat kebutuhan masyarakat. Penyediaan prasarana bertujuan untuk mendukung kegiatan-kegiatan publik agar dapat berjalan dengan sesuai rencana. Prasarana bertujuan agar ruang-ruang yang diperuntukan bagi kegiatan publik dapat berfungsi dengan baik. Penyediaan prasarana juga bertujuan agar kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat tertampung dengan baik.

Berikut ini beberapa manfaat dari pengadaan prasarana atau infrastruktur terhadap suatu wilayah:

1. Membantu menambah daya dukung lingkungan, atau mengurangi beban lingkungan
2. Melestarikan alam lingkungan
3. Mendukung kegiatan
4. Meningkatkan interaksi sosial, ekonomi, kebudayaan
5. Mengurangi jarak dan waktu, memudahkan, meringankan pembiayaan
6. Merepresentasikan kemampuan suatu wilayah

Prasarana berperan sebagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat luas yang penyediaannya dilakukan secara serentak atau massal (tidak individu). Tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas tersebut menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Penyediaan prasarana dan sarana umum merupakan tanggung jawab pemerintah karena menyangkut hajat hidup orang banyak, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan sekunder. Tanggung jawab tersebut menyangkut penyediaan dan pengaturan dalam pengelolaan prasarana dan sarana. Akan tetapi, tidak berarti bahwa pemerintah harus menyediakannya secara keseluruhan karena sebagian tanggung jawab dapat diserahkan kepada pihak lain.

### **2.3 Prasarana Persampahan**

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, memberi pengertian bahwa prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.

Prasarana persampahan adalah semua peralatan dan bangunan penunjangnya yang berfungsi dalam pengelolaan sampah mulai dari sumber timbulan sampah sampai pengolahan akhir.

Beberapa panduan praktis untuk pengumpulan sampah rumah tangga dikemukakan dibawah ini :

#### 1. Kantong plastik

Kantong plastik dengan kapasitas antara 7 hingga 10 liter, yang mampu menyimpan timbulan sampah dari satu keluarga dengan 6 anggota keluarga dengan sistem pengumpulan harian. Kantong plastik sebaiknya digunakan sebagai wadah sampah yang mudah membusuk. Kantong ini dan isinya dibuang sekaligus ke tempat penampungan sementara setiap hari. Keuntungan kantong plastik adalah ringan, isinya tidak banyak sehingga membuangnya mudah dan dapat dilakukan setiap hari, serta dapat diikat secara rapat agar tidak menimbulkan bau. Di negara-negara maju ukuran kantong plastik yang digunakan telah standar, karena telah dikombinasikan dengan kaki logam yang dapat menopang kantong plastik untuk berdiri, dengan mulut kantong yang terbuka lebar. Ukuran kantong tersebut kira-kira panjang 70 cm, lebar 50 cm dan dapat menampung sampah 20 – 30 kg. Kantong plastik ini cukup kuat, umumnya berwarna gelap.

#### 2. Keranjang sampah plastik

Wadah ini sebetulnya bersifat praktis, akan tetapi hanya dapat berfungsi baik untuk mengumpulkan bahan kering seperti kertas, kaca, gelas, kayu dan sebagainya. Seandainya juga akan digunakan untuk tempat mengumpulkan sampah basah (organik), maka bagian dalamnya dialasi kantong plastik. Sampah dengan demikian masuk dalam kantong plastik, tanpa mengotori keranjang plastiknya. Kantong plastik tersebut kemudian diikat dan diangkut ketempat penampungan sampah sementara.

#### 3. Tong sampah

Wadah ini mempunyai sifat tahan lama, namun kurang praktis, berat dan biasa bersifat stasioner karena ditanam ditanah. Tong sampah biasanya terbuat dari

potongan bekas drum. Sebaiknya sampah yang dibuang disini adalah kertas dan karton yang dapat dibakar, Karena tong kuat dari api. Tetapi bila tong disimpan dalam rumah sebaiknya tidak dilakukan proses pembakaran, karena asap dan debunya sangat mengganggu. Hal lain lagi, sebaiknya tong tidak ditempatkan secara terbuka, karena akan mudah terkena hujan dan bau busuknya menyebar, selain itu dikerubuti lalat, anjing dan kucing.

#### 4. Bak sampah

Wadah ini bersifat sangat tahan lama, tahan api, dapat dirancang bangun sebaik mungkin, akan tetapi stasioner. Hampir sama fungsinya dengan tong sampah, harus ditutup dan sebaiknya tidak ditempatkan di atas parit depan rumah untuk menghindari banjir. Untuk perumahan dengan luas pekarangan yang sempit dan padat penduduknya, wadah ini sifatnya kurang tepat. Untuk keluarga dengan jumlah anggota yang banyak harus diusahakan membuang sampah diluar rumah. Sampah juga tidak boleh dibuang tanpa bungkus karena akan menyulitkan pembuangannya.

Tabel 2.1 : Aturan-aturan teknis penyediaan sistem persampahan

Lingkup prasarana	Prasarana			keterangan		
	Sarana pelengkap	Status	Dimensi			
Rumah (5 jiwa)	Tong sampah	Pribadi	-	-		
RW (2500 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m <sup>3</sup>	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30 m	Gerobak mengangkut 3x seminggu	
	Bak sampah kecil		6 m <sup>3</sup>			
Kelurahan (30.000 jiwa)	Gerobak sampah	TPS	2 m <sup>3</sup>		Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30 m	Gerobak mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah kecil		12 m <sup>3</sup>			
Kecamatan (120.000 jiwa)	Gerobak sampah	TPS/TPA lokal	-	Jarak bebas TPS dengan lingkungan hunian minimal 30 m		Mobil mengangkut 3x seminggu
	Bak sampah kecil		25 m <sup>3</sup>			

Kota (>480.000 jiwa)	Bak sampah akhir	TPA	-	
	Tempat daur ulang sampah		-	

Sumber : SNI 03-1733-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

## 2.4 Persampahan

### 2.4.1 Pengertian Sampah

Menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah yang dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga.

Robert J.Kodoatie (2003) mendefinisikan sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan (*refuse*) sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelangsungan hidup.

Menurut SK SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional sampah perkotaan, yang dimaksud dengan sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang sampah seperti di atas maka dapat didefinisikan sampah adalah sisa bahan, limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan atau yang berasal dari aktivitas kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Persampahan adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Adapun prasarana pembuangan sampah yaitu mulai dari pembuangan sampah pada tempat yang telah disediakan sampai pengumpulan ditempat pembuangan sementara yang ada pada lingkungan tersebut.

#### **2.4.2 Jenis dan Sumber Sampah**

Dalam UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis dan sumber sampah berasal dari:

1. Sampah rumah tangga

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berskala dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau permukiman.

2. Sampah sejenis sampah rumah tangga

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berskala bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, penyapuan jalan, rumah sakit, pelabuhan, rumah makan, kantor, pertokoan (kegiatan komersial/perdagangan), taman, atau tempat umum lainnya.

3. Sampah spesifik

Sampah spesifik adalah sampah rumah tangga atau sejenis rumah tangga karena sifat, konsentrasi atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti sisa batrai bekas, sisa oli/minyak rem mobil, sisa bekas pemusnah nyamuk, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).

### 2.4.3 Timbulan Sampah

Timbulan sampah adalah banyaknya sampah yang dihasilkan orang perhari dalam satuan volume atau berat. Jumlah timbulan sampah yang diperoleh merupakan dasar yang penting dalam menentukan rancangan operasional pengelolaan sampah. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah (UU No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah), yang meliputi:

1. Sampah domestik (kegiatan rumah tangga) asrama, rumah sakit, hotel dan kantor.
2. Sampah hasil kegiatan industri
3. Sampah hasil dari kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan.
4. Sampah komersial dari hasil kegiatan perdagangan.
5. Sampah pasar, toko.
6. Sampah kontruksi.
7. Sampah dari jalan raya.

Besaran timbulan sampah berdasarkan klasifikasi kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Besaran timbulan sampah berdasarkan klasifikasi kota

No	Klasifikasi Kota	Volume (Liter/orang/hari)	Berat (Kg/orang/hari)
1	Kota sedang (100.000 ≤ p ≤ 500.000)	2,75 – 3,25	0,70 – 0,8
2	Kota kecil (p ≤ 100.000)	2,5 – 2,75	0,625 – 0,70

Banyak sampah yang dihasilkan dari sebuah kegiatan akan menentukan banyaknya sampah yang harus dikelola. Jumlah sampah yang harus dikelola ini sangat penting diketahui atau di data. Timbulan sampah masing-masing sumber atau kegiatan tersebut bervariasi satu dengan yang lain. Data informasi tentang statistic persampahan, seperti timbulan, komposisi, karakteristik, potensi daur-ulang, dan sebagainya yang disusun berdasarkan data lapangan yang akurat diakui banyak pihak sangat sulit diperoleh di Negara berkembang.

#### **2.4.4 Karakteristik Sampah**

Berdasarkan SNI 19-3241-1994 tentang tata cara pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sampah. Tipe atau jenis sampah umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sampah organik basah, adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan organik dan mempunyai sifat mudah membusuk.
2. Sampah organik kering, adalah sampah yang susunannya terdiri dari bahan organik maupun yang cukup kering yang sulit terurai oleh mikroorganismenya sehingga sulit membusuk.
3. Sampah yang berukuran besar, dalam kategori ini termasuk sampah yang berukuran besar dan berat.
4. Sampah abu, yaitu sampah padat yang berasal dari pembakaran kayu, batu bara atau insenerator. Ukurannya kecil, lembut, ringan dan mudah terbawa angin.
5. Sampah berupa lumpur dari pengolahan air bersih dan air limbah. Lumpur dari kolam pengolahan harus dihindarkan langsung masuk ke air permukaan.
6. Sampah bangkai binatang, yaitu semua sampah yang berupa bangkai binatang.

7. Sampah sapuan jalan yaitu segala jenis sampah atau kotoran yang berserakan di jalan karena dibuang oleh pengendara mobil ataupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
8. Sampah konstruksi umumnya berupa logam, beton, kaca, pipa, plumbing dan kayu.

Sampah B3(bahan beracun dan berbahaya) merupakan buangan berbahaya dan beracun bersifat toksik karena itu perlu penanganan khusus. Banyak dihasilkan dari kegiatan industri ataupun produk yang dipakai sehari-hari. Semakin banyak industri yang berdiri akan semakin beragam limbahnya.

## **2.5 Teori Pengelolaan Persampahan**

Menurut SNI 03-3242-1994 tentang tata cara pengelolaan sampah di permukiman, yang dimaksud dengan pengelolaan sampah adalah kegiatan mengatur atau mengelola sampah dari proses pengumpulan, pemisahan, pemindahan sampai pengelolaan dan pembuangan akhir.

Menurut Kodoatie, Robert J (2003:217), sistem pengelolaan sampah perkotaan pada dasarnya dilihat dari komponen-komponen yang saling mempengaruhi atau mendukung satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yaitu kota yang bersih sehat dan teratur. Komponen tersebut yaitu:

1. Aspek Teknik Operasional
2. Apek Kelembagaan
3. Aspek Pembiayaan
4. Aspek Hukum
5. Aspek Peran Serta Masyarakat

Karena sistem pengelolaan sampah harus utuh dan tidak terpotong rantai ekosistem maka diperlukan tindakan terkoordinatif, sinkronisasi dan simplikasi. Untuk

peningkatan penangan persampahan banyak hal yang harus ditinjau diantaranya operasional pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir serta peralatan yang digunakan. Disamping itu yang sangat berperan adalah aspek organisasi dan manajemen di dalam pengelolaannya.

Menurut SNI 19-2454-2002 tentang tata cara operasional persampahan perkotaan, pada dasarnya sistem pengelolaan sampah perkotaan dilihat sebagai komponen-komponen subsistem yang saling mendukung, saling berinteraksi, dan saling berhubungan satu sama lain.

### **2.5.1 Aspek Teknik Operasional Persampahan**

Teknik operasional persampahan menurut SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional sampah perkotaan terdiri dari 6 komponen yaitu pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengelolaan, dan pemilihan, pengangkutan, pembuangan akhir.

#### **1. Pewadahan**

Menurut SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional sampah perkotaan, Pewadahan sampah adalah aktivitas menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah. Pewadahan adalah proses pertama kali penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut, dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Tujuan proses pewadahan untuk agar sampah tidak berserakan, sehingga lingkungan bersih, sehat dan mempunyai nilai estetika yang baik. Selain itu juga memudahkan pengangkutan ke tempat selanjutnya.

Pewadahan sampah adalah cara penampungan sampah sementara di masing-masing sumbernya. Untuk mencegah sampah berserakan yang akan memberikan

kesan kotor serta mempermudah proses kegiatan pengumpulan maka dari sampah yang dihasilkan perlu disediakan tempat untuk penyimpanan/penampungan sambil menunggu kegiatan pengumpulan sampah. Namun pendekatan untuk perwadahan sampah harus mendukung dan sesuai dengan persyaratan sistem pengelolaan sampah di sumbernya, dan sesuai dengan persyaratan sistem pengolahan dan pemanfaatan sampah kota yang direncanakan.

Kriteria lokasi dan penempatan wadah adalah sebagai berikut:

- 1) Wadah individual, ditempatkan di halaman muka, di halaman belakang untuk sumber sampah dari hotel atau restoran.
- 2) Wadah komunal, ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber sampah, tidak mengganggu pemakai jalan atau sarana umum lainnya, di luar jalur lalu lintas, diujung gang kecil, di sekitar taman dan pusat keramaian.

Tabel 2.3 : Contoh wadah dan penggunaannya

No	Jenis Wadah	Kapasitas	Pelayanan	Umur wadah	Keterangan
1	Kantong plastik	10-40 L	1 KK	2-3 hari	Individual
2	Tong	40 L	1 KK	2-3 tahun	Maksimal, pengambilan 3 kali, sehari
3	Tong	120 L	2-3 KK	2-3 tahun	Toko
4	Tong	140 L	4-6 KK	2-3 tahun	
5	Kontainer	1000 L	80 KK	2-3 tahun	Komunal
6	Kontainer	500 L	40 KK	2-3 tahun	Komunal
7	Tong	30-40 L	Pejalan kaki, taman	2-3 tahun	

Sumber: SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan

Menurut SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan, persyaratan bahan untuk pewardahan sampah adalah sebagai berikut:

1. Tidak mudah rusak dan kedap air kecuali kantong plastik atau kertas.
2. Mudah untuk diperbaiki.
3. Ekonomis, mudah diperoleh/dibuat oleh masyarakat.

4. Mudah dan cepat dikosongkan.

Persyaratan untuk bahan dengan pola individual dan komunal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4: Karakteristik wadah sampah

No	Karakteristik	Individual	Komunal
1	Bentuk	Kotak, silinder, kontainer, bin (tong), semua tertutup, dan kantong plastik	Kotak, silinder, kontainer, bin (tong), semua tertutup
2	Sifat	Ringan, mudah dipindahkan dan mudah dikosongkan	Ringan, mudah dipindahkan dan mudah dikosongkan
3	Jenis	Logam, plastik, <i>fiberglass</i> (GRP), kayu, bambu, rotan	Logam, plastik, <i>fiberglass</i> (GRP), kayu, bambu, rotan
4	Pengadaan	Pribadi, instansi, pengelola	Instansi pengelola

## 2. Pengumpulan

Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan sementara atau langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan. TPS yang digunakan biasanya kontainer kapasitas 10 m<sup>3</sup>, 6 m<sup>3</sup>, 1 m<sup>3</sup>, transfer depo, bak pasangan batu bata, drum bekas volume 200 liter, dan lain-lain. TPS-TPS tersebut penempatannya disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada.

Pola pengumpulan sampah terdiri dari :

- a. Pola Individual Langsung, adalah cara pengumpulan sampah dari rumah-rumah/ sumber sampah dan diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir tanpa melalui proses pemindahan.
- b. Pola Individual Tak Langsung, adalah cara pengumpulan sampah dari masing-masing sumber sampah dibawa ke lokasi pemindahan (menggunakan gerobak) untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir.
- c. Pola Komunal Langsung, adalah cara pengumpulan sampah dari masing-masing titik wadah komunal dan diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir

d. Pola Komunal Tak Langsung, adalah cara pengumpulan sampah dari masing-masing titik wadah komunal dibawa ke lokasi pemindahan (menggunakan gerobak) untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir.

### 3. Pengangkutan

Pengangkutan sampah adalah tahap membawa sampah dari lokasi pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju ke tempat pembuangan akhir (SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan). Untuk mengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA), digunakan truk jenis *Dump Truck*, *Arm Roll Truck*, dan jenis *Compactor Truck*.

Frekuensi pengangkutan dapat bervariasi yaitu untuk daerah-daerah menengah ke atas lebih sering dibandingkan dengan daerah lainnya, misalnya 2 kali sehari, sedangkan untuk kawasan lainnya 1 kali sehari. Namun demikian hendaknya perlu dipahami apabila kurang dari 1 kali sehari menjadi tidak baik karena sampah yang tinggal lebih dari 1 hari dapat mengalami proses pembusukan sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.

Frekuensi pengangkutan perlu ditetapkan dengan teratur, disamping untuk memberikan gambaran kualitas pelayanan, juga untuk menetapkan jumlah kebutuhan tenaga dan peralatan, sehingga biaya operasi dapat diperkirakan. Frekuensi pelayanan yang teratur akan memudahkan bagi para petugas untuk melaksanakan kegiatannya.

Frekuensi pelayanan dapat dilakukan 3 hari sekali atau maksimal 2 kali seminggu. Meskipun pelayanan yang lebih sering dilakukan adalah baik, namun biaya operasional akan menjadi lebih tinggi sehingga frekuensi pelayanan harus diambil

yang optimum dengan memperhatikan kemampuan memberikan pelayanan, jumlah volume sampah, dan komposisi sampah.

### **2.5.2 Aspek Kelembagaan**

Instansi yang menangani masalah kebersihan dan sampah umumnya adalah dinas kebersihan dan Pertamanan masing-masing Kota/Kabupaten. Dalam pengelolaan sampah Pemkot/Pemkab dapat melibatkan pihak swasta dalam hal pengangkutan sampah ke TPA pada lokasi yang tidak terlayani oleh dinas, pihak swasta juga secara swakelola melakukan usaha pengolahan sampah menjadi kompos. Pada umumnya, dinas belum mempunyai pola kerja yang terintegrasi dan terpadu dalam pengelolaan sampah, dimana belum terarahnya koordinasi antara pihak dinas dan swasta sehingga banyak pihak swasta mengeluh karena kurang mendapat perhatian dari dinas.

Jumlah personil pengelolaan persampahan harus cukup memadai sesuai dengan lingkup tugasnya. Untuk sistem pengumpulan jumlah personil minimal 1 orang per 1000 penduduk yang dilayani sedangkan sistem pengangkutan, sistem pembuangan akhir dan staf minimal 1 orang per 1000 penduduk. Bentuk pendekatan perhitungan tenaga staf berbeda dengan perhitungan tenaga pelaksana. Perhitungan jumlah tenaga staf memperhatikan struktur organisasi dan beban tugas. Perhitungan jumlah tenaga operasional memperhatikan disain pengendalian, disain dan jumlah peralatan, disain operasional, keperluan tenaga penunjang dan pembantu, dan beban penugasan.

### **2.5.3 Aspek Pembiayaan**

Aspek Pembiayaan dalam Sistem Pengelolaan Persampahan mempunyai peran penting dalam menjalankan roda operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan. Berbagai masalah penanganan sampah yang timbul pada umumnya disebabkan oleh adanya keterbatasan dana, seperti keterbatasan dana investasi peralatan, dana operasi dan pemeliharaan sehingga kualitas pelayanan sampah sangat ditentukan

oleh harga satuan per meter 3 sampah. Besaran biaya satuan ini bahkan dapat digunakan sebagai indikator tingkat efisiensi atau keberhasilan pengelolaan sampah disuatu kota. Tanpa ditunjang dana yang memadai, akan sulit mewujudkan kondisi kota yang bersih dan sehat.

Kebutuhan biaya pengelolaan sampah ini akan meningkat sejalan dengan tingkat pelayanan atau volume sampah yang harus dikelola. Pihak institusi pengelola persampahan dituntut untuk dapat merencanakan kebutuhan dana secara akurat setiap tahunnya agar roda pengelolaan dapat terus berjalan sesuai dengan tujuan utama, yaitu mewujudkan kota bersih dan sehat.

Daerah dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah adalah tidak saja dana investasi yang terbatas, tetapi juga keterbatasan biaya investasi, operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan tersebut, sehingga optimalisasi penggunaan peralatan yang ada kurang memadai.

Untuk meningkatkan bantuan dana dalam pengelolaan sampah dapat memaksimalkan retribusi dari pelayanan pengelolaan sampah. Untuk mencapai target dan meningkatkan perolehan penerimaan retribusi perlu upaya peningkatan partisipasi masyarakat secara terus menerus/berkelanjutan.

Sumber dana merupakan salah satu sumber daya system pengelolaan persampahan, dana tersebut meliputi :

1. Retribusi, yaitu sumber dana yang digali dari masyarakat.
2. Iuran sampah yaitu sumber dana masyarakat dilaksanakan oleh organisasi masyarakat tanpa peraturan formal.
3. Subsidi yaitu sumber dana pemerintah daerah karena dana masyarakat tidak mencukupi untuk menekan tarif retribusi.
4. Subsidi silang yaitu strategi pendanaan yang kuat membantu untuk yang lemah

#### **2.5.4 Aspek Hukum dan Peraturan**

Dalam upaya pengelolaan persampahan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten/Kota harus merupakan bagian dari mewujudkan visi, yaitu “Mewujudkan pelayanan di bidang kebersihan dan penataan taman. Adapun misi dalam pengelolaan sampah dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan aspek-aspek pengelolaan kebersihan, antara lain manajemen keuangan, teknis operasional, hukum dan peran serta masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan dan pertamanan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara keseluruhan.
4. Mewujudkan lingkungan /wilayah yang bersih, sehat, rindang dan indah.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemkab/Pemkot sebagai penanggung jawab pengelolaan kebersihan di Kabupaten/Kota dapat menyediakan beberapa fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan kebersihan. Dalam menyelenggarakan program kebersihan di lapangan, para pejabat struktural membutuhkan mitra kerja yang dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat luas. Mitra kerja tersebut adalah Tim Penggerak PKK, LSM dan masyarakat. Eksistensi mitra kerja perlu dicantumkan dalam Perda guna memperjelas dan memperkuat posisi mereka.

Pembentukan kader lingkungan di setiap kampung yang juga berfungsi sebagai ujung tombak untuk mensosialisasikan dan memotivasi masyarakat untuk melakukan pengolahan sampah perlu diperhatikan. Sedangkan Peraturan Daerah lainnya yang diperlukan adalah tentang ketentuan-ketentuan pembuangan sampah/kebersihan termasuk buangan industri, yang dapat digunakan sebagai landasan umum dalam pengelolaan sampah.

Untuk pengelolaan persampahan diperlukan dasar hukum pengelolaan persampahan yang mencakup (Syafuruddin, 2006) :

1. Peraturan daerah yang dikaitkan dengan ketentuan umum pengelolaan kebersihan yang berlaku.
2. Peraturan daerah tentang pembentukan badan pengelolaan kebersihan.
3. Peraturan daerah yang khusus menentukan struktur tarif dan tarif dasar pengelolaan kebersihan.

Aspek pengaturan didasarkan atas kenyataan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana sendi-sendi kehidupan bertumpu pada hukum yang berlaku. Pengelolaan sampah di Indonesia membutuhkan kekuatan dan dasar hukum seperti pembentukan organisasi, pemungutan, retribusi, keterlibatan masyarakat dan sebagainya. Aspek pengaturan memegang peranan penting dalam pengelolaan sampah, hal ini mengingat kesadaran masyarakat dan pola hidup masyarakat dalam memperlakukan sampah belum baik.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5: Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Kesimpulan
1	Analisis ketersediaan prasarana persampahan di Pulau Kumo dan Pulau Kakara di Kabupaten Halmahera Utara	Joflius Dobiki (2018)	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi prasarana persampahan dan menganalisis ketersediaan prasarana persampahan yang ada di Pulau Kumo dan Pulau Kakara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah memakai metode analisis kualitatif dan kuantitatif dengan memakai pendekatan secara deskriptif yaitu analisis objek penelitian. Hasil observasi dilapangan tidak terdapat prasarana pengumpulan sampah sementara (TPS) akibatnya penduduk setempat menggunakan cara membajar sampah dan membuang ke laut.
2	Analisis pengelolaan persampahan di Kelurahan Sindulang Satu Kecamatan Tuminting Kota Manado	Loisa Novany, Veronica A. Kumurur, Ingerid L. Moniaga (2014)	Tujuan penelitian ini adalah mengetahui cara pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sindulang Satu. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebersihan lingkungan permukiman tergantung pada keberadaan kondisi infrastruktur dan status social ekonomi masyarakat. Di tiap lokasi permukiman memiliki fasilitas/sarana persampahan yang ideal adalah system pengelolaan yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat.
3	Evaluasi pengelolaan persampahan di Kota Manado (Studi kasus: Kecamatan Wenang)	Matmaina Albanjar, Ir.Roosje.J.Poluan,M. Si, & M.Rengkung.ST.,M.S i (2018)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi pengelolaan sampah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu melukiskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat sehingga dengan demikian penulis menguraikan secara mendalam hasil penelitian tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dari hasil penelitian ini, Dinas Lingkungan Hidup, serta pemerintah setempat sudah mengupayakan menerapkan aturan terkait, akan tetapi keterbatasan armada pengangkut sampah dan kurangnya kepedulian dari masyarakat setempat menjadi hambatan dalam pengelolaan sampah.

4	Evaluasi pengelolaan sampah Kabupaten Gowa (Studi kasus: Kecamatan Somba Opu)	Syahriar Tato (2015)	Banyak masyarakat yang tidak terlayani sehingga menimbulkan masalah peningkatan jumlah timbulan sampah, daerah layanan sampah perkotaan yang rendah dan tidak jelasnya strategi pengelolaan sampah berdampak negative terhadap lingkungan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian pengelolaan sampah yang ada saat ini.
5	Analisis kebutuhan prasarana persampahan Kota Luwuk	Nurwahdaniar M DG Masikki (2013)	Penelitian ini bertujuan menelaah ketersediaan prasarana untuk sampah domestik dan komersil di Kota Luwuk, menguraikan arahan pengembangan prasarana untuk sampah domestik dan komersil di Kota Luwuk yang meliputi lahan TPS, alat angkut, pola pengangkutan, berikut kebutuhan lahan TPA yang mengakomodasi sampah domestik dan komersil untuk 10 tahun kedepan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahunnya terjadi penambahan prasarana persampahan meliputi penambahan TPS, Penambahan alat angkut, penambahan lahan TPA, dan pengembangan pola pengangkutan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah penelitian dengan cara menggambarkan hasil penelitian dalam gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang teliti dengan melakukan pengamatan atau observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Sedangkan metode kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

Metode deskriptif kualitatif ini lebih banyak menggunakan teknik analisis yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Tujuan dari metodologi ini bukan suatu generalisasi melainkan suatu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

#### **3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Benai, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi. Alasan mengambil lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan kondisi lingkungan Kelurahan Benai dengan keadaan persampahan yang cenderung buruk, dibuktikan dengan banyaknya titik lokasi yang terlihat kotor dengan sampah yang berserakan diberbagai lokasi penelitiab sepanjang jalan lingkungan Kelurahan Benai, pinggiran jalan utama, lahan kosong, dan lain sebagainya.

### **3.3 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilakukan dimulai dengan melakukan usaha penelitian, kegiatan survei lapangan, pembuatan proposal, kegiatan penelitian, pengumpulan data penelitian, sampai dengan perampungan hasil penelitian dan proses kegiatan penyelesaian penelitian yang membutuhkan waktu kurang lebih 4 (empat) bulan yaitu dari Bulan Agustus sampai Bulan Desember Tahun 2020.

### **3.4 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

#### **3.4.1 Data primer**

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari hasil survei terhadap kondisi eksisting prasarana persampahan yang tersedia, sistem yang dipakai dalam pengelolaan sampah dan luasan prasarana persampahan yang ada. Dalam rangka mengumpulkan data primer peneliti melakukan kegiatan-kegiatan berupa observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi gambar. Observasi lapangan untuk mendapatkan informasi langsung dari informan kunci terkait kondisi dan ketersediaan prasarana persampahan dan pengelolaan persampahan dalam aspek kelembagaan, aspek retribusi, dan aspek hukum.

#### **3.4.2 Data sekunder**

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap literatur, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah dan berbagai sumber tertulis lainnya selain itu data yang diperoleh berupa dokumen dan arsip resmi dari beberapa lembaga yang terkait dengan penelitian ini seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor Camat Benai, Kantor Lurah Benai.

### **3.5 Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui:

#### **3.5.1 Observasi Lapangan**

Observasi lapangan yaitu melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kelurahan Benai Kecamatan Benai. Pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap kondisi dan ketersediaan prasarana persampahan dan pengelolaan sampah dalam aspek kelembagaan, aspek retribusi, dan aspek hukum.

#### **3.5.2 Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui pembicaraan secara langsung atau lisan untuk mendapatkan terlebih dahulu jawaban dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik *sampling non random sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian.

Informan dalam penelitian ini merupakan individu atau kelompok yang mengetahui tentang persoalan yang sedang diteliti dan diharapkan memberikan informasi yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* yaitu berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan tertentu.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua yaitu Rumus yang digunakan untuk menentukan ukuran/jumlah sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan rumus *Slovin* (Sevilla dalam Umar Husein 2003 : 109) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N e^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Ukuran Populasi

N = Jumlah Penduduk tahun 2019

e = nilai kritis yang diinginkan, yaitu sebesar 10%

Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu berdasarkan data jumlah penduduk Kelurahan Benai yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{1.553}{1.553(0.1)^2 + 1} = 93,9 = 94 \text{ sampel dari populasi di Kelurahan Benai}$$

Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu bagaimana pengelolaan persampahan dalam aspek kelembagaan, aspek retribusi dan aspek pengaturan. Untuk menjawab rumusan masalah kedua ini yaitu menggunakan wawancara yang dilakukan dengan teknik purposive sampling. Informan kunci yang dipilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Informan Kunci dari Intansi Terkait

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Suryan Hendri, ST	Kabid Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2	Gusrion	Staff Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
3	Aditya Wahyu Prakoso	Staff Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
4	Faizal Indra, S.Pr	Sekretaris Kecamatan Benai	Kantor Camat Benai
5	Jasmi	Pelaksana Seksi TRAMTIB	Kantor Camat Benai
6	Hengki Lendra Elmi, SH	Kasi Pemerintahan Kecamatan Benai	Kantor Camat Benai
7	Andi Kristian, S.Sos	Kepala Lurah Kelurahan Benai	Kantor Lurah Benai
8	Novita Sari	Staff Kantor Lurah Kelurahan Benai	Kantor Lurah Benai

### 3.5.3 Dokumentasi

Menurut Sedarmayanti dalam Mahmud (2011:183), dokumen adalah catatan tertulis yang isinya berupa pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealamiah yang sukar diperoleh, sukar ditemukan dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto kondisi prasarana persampahan yang langsung diambil dilokasi penelitian.

### 3.5.4 Studi Pustaka

Studi pustaka adalah data yang diperoleh dengan mencari sumber-sumber data dari buku-buku, perpustakaan, serta membaca jurnal yang ada di internet yang dapat di percaya dan dapat dipertanggung jawabkan.

### 3.6 Variabel yang Diamati

Variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2: Variabel penelitian

No	Tujuan	Variabel	Indikator	Sumber
1	Menganalisis ketersediaan prasarana persampahan kelurahan benai	Aspek Teknik Operasional Persampahan	1. Pewadahan 2. Pengumpulan 3. Pengangkutan	SNI 19-2454-2002 Tentang Tata Cara Operasional Persampahan Perkotaan
2	Menganalisis pengelolaan persampahan kelurahan benai	Aspek Pembiayaan	Besarnya tarif retribusi	SNI 3242-2008 Tentang Pengelolaan Persampahan di Permukiman
		Aspek Kelembagaan	Lembaga/kelompok yang mengelola masalah persampahan	
		Aspek Hukum dan Peraturan	Pengaturan tentang persampahan	

### **3.7 Teknik Analisis**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut:

#### **1. Pengumpulan data**

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti yang telah dijelaskan di awal, yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### **2. Reduksi data**

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

#### **3. Penyajian data**

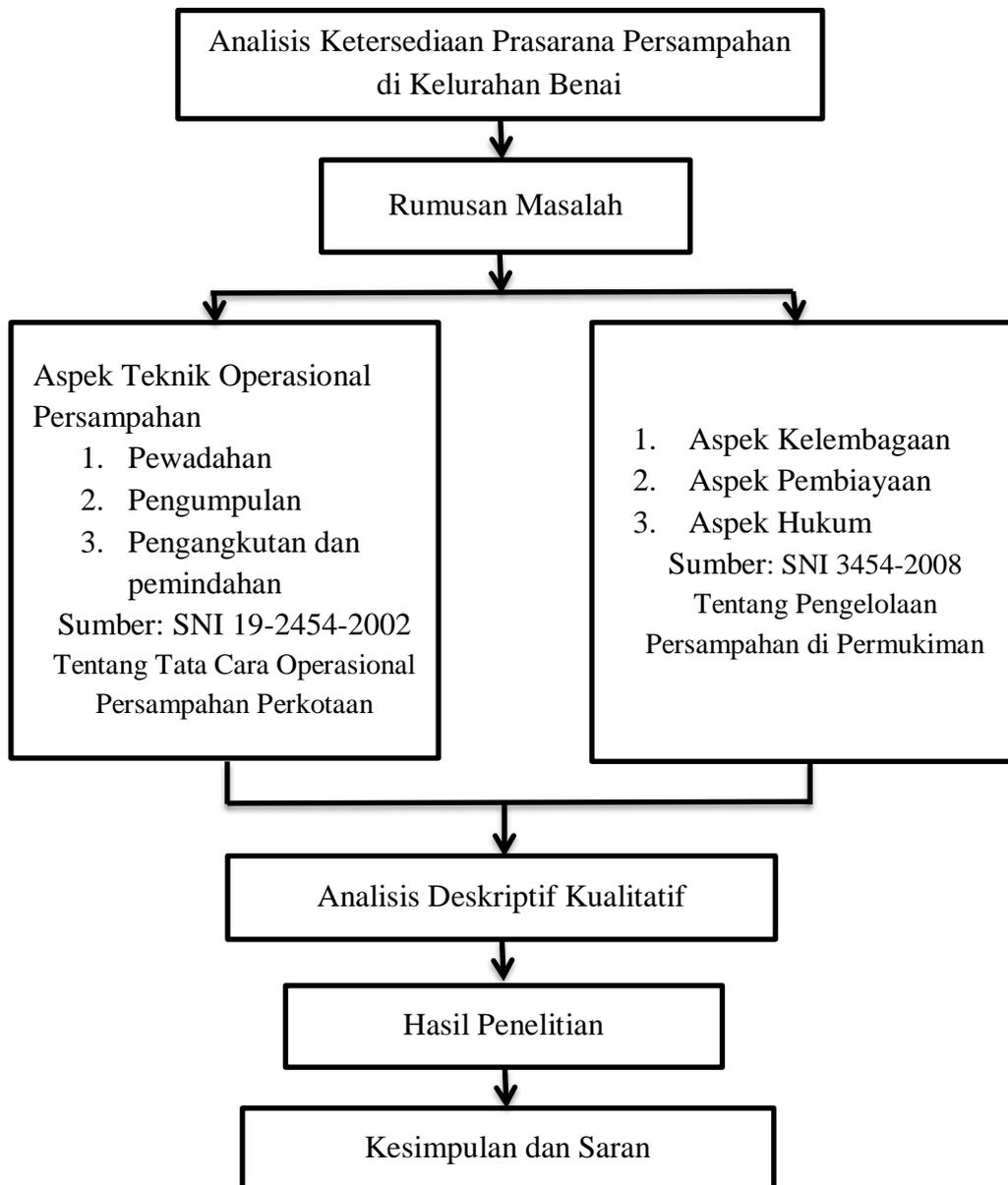
Penyajian data yang dilakukan peneliti adalah upaya untuk menyusun sekumpulan informasi yang telah diperoleh di lapangan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.

#### **4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi**

Pada tahap ini, peneliti mulai mencari makna dari data yang terkumpul. Selanjutnya peneliti mencari arti dan penjelasannya serta menyusun pola-pola hubungan tertentu yang mudah dipahami dan ditafsirkan. Data tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.

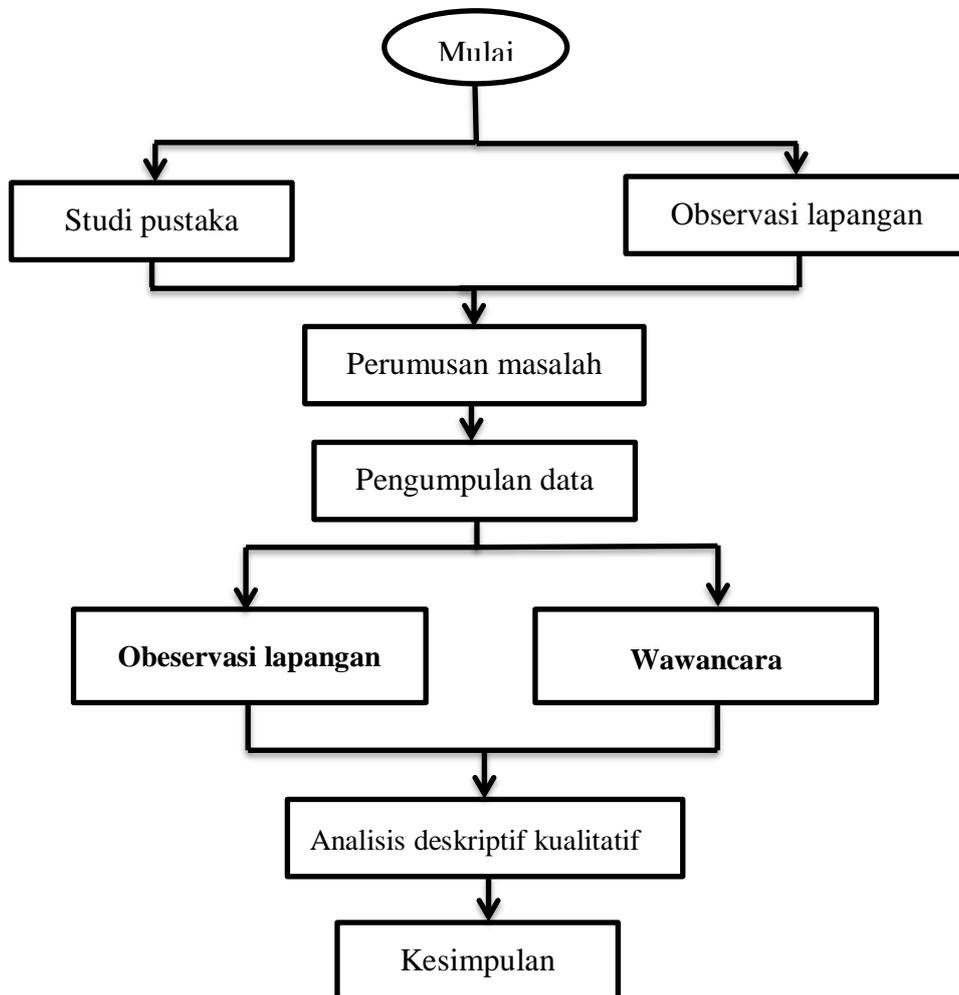
### 3.8 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 : Kerangka pikir

### 3.9 Kerangka Alur Penelitian



Gambar 3.2 : Kerangka alur penelitian

### 3.10 Rencana Jadwal Penelitian

Tabel 3.3 Rencana Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan									
		Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Pengajuan Judul	■									
2	Pengumpulan Data	■	■	■							
3	Proses Bimbingan	■	■	■							
4	Seminar Proposal				■						
5	Penelitian					■	■	■			
6	Proses Bimbingan Penelitian					■	■	■	■		
7	Seminar Hasil									■	
8	Bimbingan Revisi Seminar Hasil									■	■
9	Sidang Skripsi										■

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kecamatan Benai

##### 4.1.1 Administrasi Wilayah

Kecamatan Benai Merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 16.673 jiwa dengan luas wilayah 124,66 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 15 desa dan 1 kelurahan.

##### 4.1.2 Kondisi Geografis

Kecamatan Benai dengan luas 124,66 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 15 desa dan 1 kelurahan.

Batas-batas wilayah Kecamatan Benai :

- a. Sebelah *Barat* berbatasan dengan *Kecamatan Sentajo Raya*
- b. Sebelah *Timur* berbatasan dengan *Kecamatan Kuantan Hilir*
- c. Sebelah *Selatan* berbatasan dengan *Kecamatan Kuantan Mudik*
- d. Sebelah *Utara* berbatasan dengan *Kecamatan Sentajo Raya*

Kecamatan Benai pada umumnya beriklim tropis dengan curah hujan pada 2019 berkisar antara 54-466 mm per tahun.

Tabel 4.1 : Luas Wilayah Kecamatan Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2019

No	Desa / Kelurahan	Luas Wilayah	Persentase (%)
1	Koto Benai	1.76	1.41
2	Talontam	1.85	1.48
3	Banjar Benai	19.62	15.74
4	Gunung Kesiangan	25.99	20.85
5	Banjar Lopak	5.15	4.13
6	Pulau Kalimantan	21.93	17.59
7	Tanjung	2.00	1.60
8	Pulau Ingu	10.00	8.02
9	Simandolak	3.50	8.10
10	Tebing Tinggi	10.01	4.39
11	Pulau Lancang	5.47	3.59
12	Pulau Tongah	4.47	2.18

13	Ujung Tanjung	2.86	2.29
14	Siberakun	4.64	3.72
15	Benai	3.50	2.81
16	Benai Kecil	2.60	2.09
<b>Benai</b>		<b>124.66</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Kantor Camat Benai Tahun 2019

#### 4.1.3 Pemerintahan

Kecamatan Benai mempunyai 16 desa/kelurahan yang definitif sampai akhir Tahun 2019, terdapat 53 dusun di Kecamatan Benai. Dengan rata-rata 3 dusun tiap desa.

Tabel 4.2: Desa/Kelurahan Menurut Status Pemerintahan Di Kecamatan Benai

No	Desa/Kelurahan	Status Pemerintahan	
		Desa	Kelurahan
1	Koto Benai	√	-
2	Talontam	√	-
3	Banjar Benai	√	-
4	Gunung Kesiangan	√	-
5	Banjar Lopak	√	-
6	Pulau Kalimantan	√	-
7	Tanjung	√	-
8	Pulau Ingu	√	-
9	Simandolak	√	-
10	Tebing Tinggi	√	-
11	Pulau Lancang	√	-
12	Pulau Tongah	√	-
13	Ujung Tanjung	√	-
14	Siberakun	√	-
15	Benai	-	√
16	Benai Kecil	√	-

Sumber : Kantor Camat Benai Tahun 2019

#### 4.1.4 Kependudukan

Jumlah Penduduk Kecamatan Benai pada Tahun 2019 berjumlah 16.673 jiwa, yang terdiri dari 8.311 jiwa laki-laki dan 8.362 jiwa perempuan. Dengan Sex Rasio sebesar 99,39, menunjukkan tidak adanya perbedaan yang besar untuk komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, karena dalam 100 orang perempuan terdapat 99 orang laki-laki.

Dengan luas wilayah Kecamatan Benai 124,66 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduknya 16.673 jiwa, menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 133.75 yang artinya dalam setiap 1 km<sup>2</sup> dihuni oleh sekitar 133 penduduk.

Kecamatan Benai mempunyai 4.190 jumlah rumah tangga dengan rata-rata jumlah penduduk dalam rumah tangga adalah 4 orang. Jumlah tersebut hampir merata di semua desa/kelurahan.

Tabel 4.3: Penduduk Kecamatan Benai

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Sex Rasio
2016	8040	8110	16.194	99.68
2017	8162	8201	16.363	99.48
2018	8241	8284	16.525	99.48
2019	8311	8362	16.673	99.39

Sumber : BPS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019

Tabel 4.4: Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Benai

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Koto Benai	184	184	368
2	Talontam	501	480	981
3	Banjar Benai	1888	1713	3601
4	Gunung Kesiangan	323	328	651
5	Banjar Lopak	325	352	677
6	Pulau Kalimantan	235	233	468
7	Tanjung	235	260	495
8	Pulau Ingu	705	731	1436
9	Simandolak	734	843	1577
10	Tebing Tinggi	825	842	1667
11	Pulau Lancang	285	299	584
12	Pulau Tongah	314	334	648
13	Ujung Tanjung	190	195	385
14	Siberakun	499	488	987
15	Benai	788	765	1553
16	Benai Kecil	280	315	584
<b>Jumlah</b>		<b>8311</b>	<b>8362</b>	<b>16.673</b>

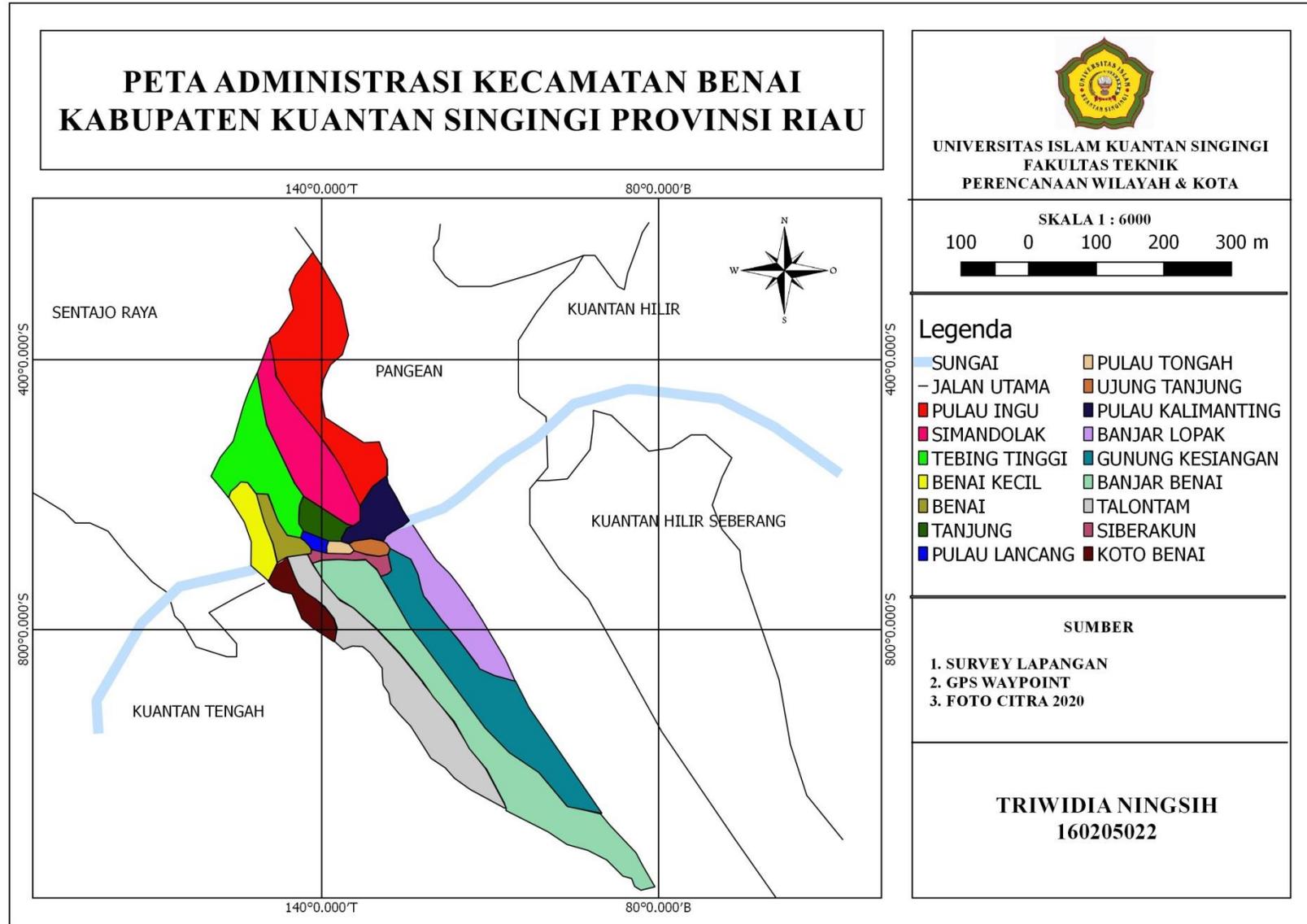
Sumber : Kantor Camat Benai Tahun 2019

Tabel 4.5 Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Benai

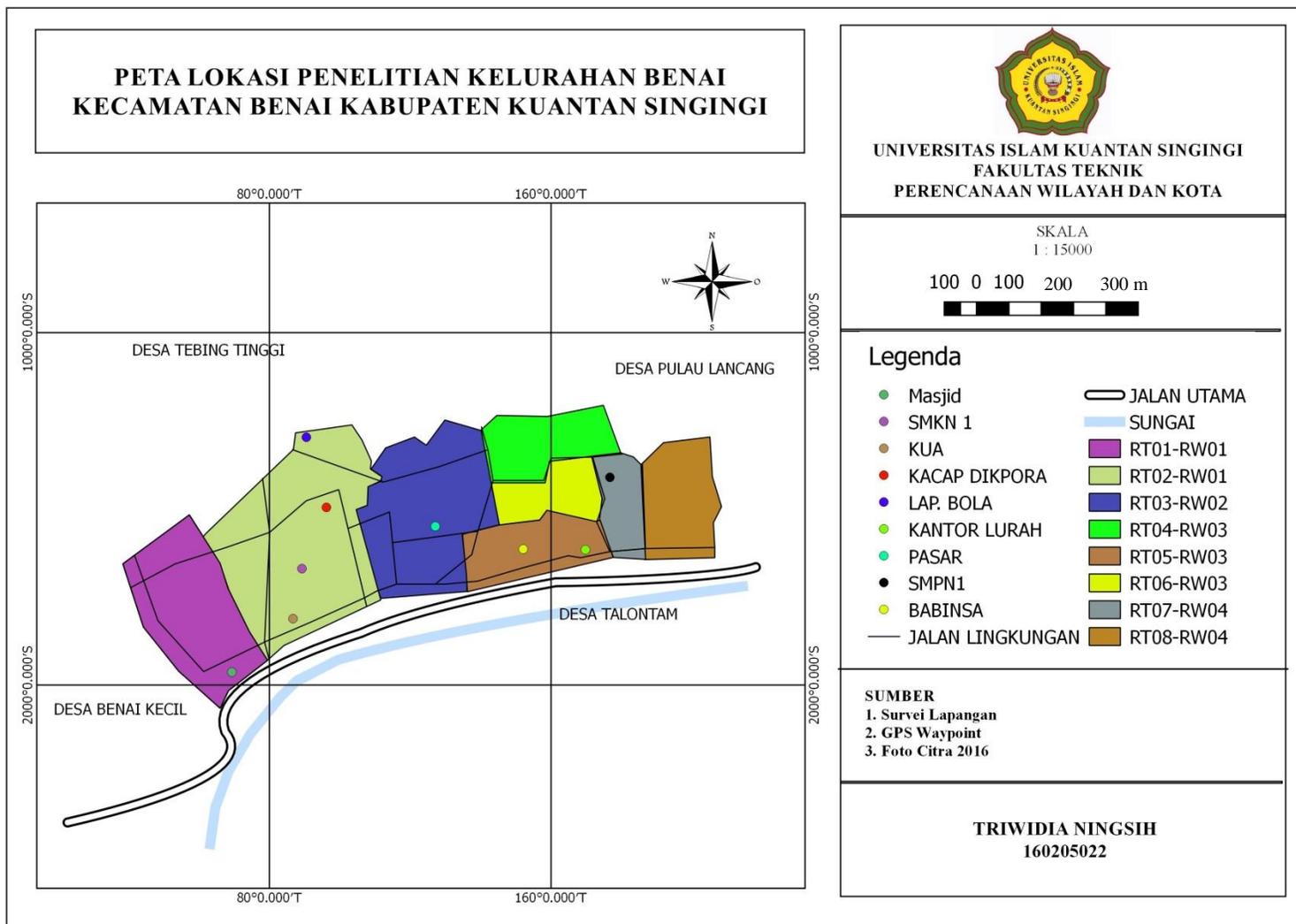
No	Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
1	Koto Benai	364	1.76	206.82
2	Talontam	972	1.85	525.41
3	Banjar Benai	3571	19.62	182.01
4	Gunung Kesiangan	645	25.99	24.82

5	Banjar Lopak	671	5.15	130.29
6	Pulau Kalimantan	464	21.93	21.16
7	Tanjung	491	2.00	245.50
8	Pulau Ingu	1423	10.00	142.30
9	Simandolak	1563	10.10	154.75
10	Tebing Tinggi	1653	5.47	302.19
11	Pulau Lancang	578	4.47	129.31
12	Pulau Tongah	642	2.72	236.03
13	Ujung Tanjung	382	2.86	133.57
14	Siberakun	977	4.64	210.56
15	Benai	1539	3.50	239.71
16	Benai Kecil	590	2.60	226.92
<b>Jumlah</b>		<b>16.525</b>	<b>124.66</b>	<b>132.56</b>

Sumber : Kantor Camat Benai Tahun 2019



Gambar 4.1: Peta Administrasi Kecamatan Benai



Gambar 4.2: Peta lokasi penelitian Kelurahan Benai

## 4.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian

### 4.2.1 Produksi Sampah di Kelurahan Benai Kecamatan Benai

Produksi sampah di Kelurahan Benai bertujuan untuk mengetahui besarnya produksi sampah yang dihasilkan, baik dari kegiatan permukiman maupun non permukiman. Disamping itu, juga untuk mengetahui penyebaran produksi sampah yang ada di Kelurahan Benai. Kelurahan Benai adalah ibu kota Kecamatan benai dimana Kelurahan Benai di dominasi perumahan penduduk dan menjadi pusat perekonomian dalam perdagangan, pelayanan jasa, pusat pendidikan dan pusat perkantoran. Dengan luas wilayah 3.50 Km<sup>2</sup>, jumlah penduduk 1.553 jiwa dan kepadatan penduduk 443,71 jiwa/km<sup>2</sup> (Data BPS, Kabupaten Kuantan Singingi dalam angka 2020).

Menurut SNI S-04-2993-03 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah, besaran timbulan sampah berdasarkan klasifikasi Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia adalah sebesar 2,5-2,75 liter/orang/hari. Untuk menghitung produksi sampah atau timbulan sampah dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk dikalikan dengan besarnya timbulan sampah rata-rata perorang setiap hari.

Berdasarkan pengolahan data, jumlah penduduk Kelurahan Benai saat ini adalah sebesar 1.553 jiwa, sehingga dengan asumsi timbulan sampah sebesar 2,5 liter/orang/hari maka produksi sampah di Kelurahan Benai mencapai 3.882,5 m<sup>3</sup>/hari atau 970,625 Kg/hari.

Berikut tabel produksi sampah atau timbulan sampah di Kelurahan Benai Kecamatan Benai:

Tabel 4.6: Produksi Sampah di Kelurahan Benai

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Volume Timbulan Sampah (liter/hari)
1	2015	1.475	3.687,5
2	2016	1.492	3.730
3	2017	1.509	3.772,5

4	2018	1.525	3.812,5
5	2019	1.553	3.882,5

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Berdasarkan tabel diatas besarnya produksi sampah di Kelurahan Benai dapat dihitung berdasarkan jumlah penduduk dikalikan dengan besarnya timbulan sampah rata-rata per orang per hari menurut SNI S-04-1993-03 tentang timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang di Indonesia adalah sebesar 2,5-2,75 liter/org/hari. Kelurahan benai pada tahun 2015 memiliki jumlah penduduk sebesar 1.475 jiwa sehingga dengan asumsi timbulan sampah di Kelurahan Benai yang bersumber dari permukiman mencapai 3.687,5 liter/hari. Sama halnya untuk tahun-tahun berikutnya, pada tahun 2019 peningkatan jumlah penduduk meningkat menjadi 1.553 jiwa sehingga timbulan sampah yang dihasilkan juga meningkat yaitu sebanyak 3.882,5 liter/hari.

Menurut SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan ketentuan dan syarat pengadaan pewadahan persampahan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Jenis Pewadahan</b>	<b>Kapasitas</b>	<b>Pelayanan</b>	<b>Umur Wadah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kantong Plastik	10-40 L	1 KK	2-3 Hari	Individual
2	Tong Sampah	40 L	1 KK	2-3 Tahun	Maksimal pengambilan 3 hari 1 kali
3	Tong Sampah	120 L	2-3 KK	2-3 Tahun	toko
4	Tong Sampah	140 L	4-6 KK	2-3 Tahun	Komunal
5	TPS Batu Bata	1000 L	80 KK	2-3 Tahun	Komunal
6	Kontainer	500 L	40 KK	2-3 Tahun	Komunal
7	Tong Sampah	30-40 L	Pejalan Kaki, Umum	2-3 Tahun	Komunal

Sumber: SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan

Berdasarkan hasil penelitian kapasitas sampah di Kelurahan Benai tahun 2019 adalah sebanyak 3.882,5 liter/hari. Kelurahan Benai memiliki 2 buah TPS batu bata yang terletak di dalam pasar benai. TPS tersebut tidak hanya digunakan oleh masyarakat

Kelurahan Benai saja namun juga digunakan oleh pelaku usaha yang datang untuk berjualan di pasar benai. Prasarana Persampahan yang ada belum memenuhi kapasitas sampah yang seharusnya terlayani.

Sehingga jika dibandingkan dengan SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan sarana yang dibutuhkan untuk memenuhi pelayanan persampahan di Kelurahan Benai adalah menggunakan 4 buah TPS batu bata yang masing-masing kapasitasnya sebanyak 1000 L / 80 KK.

#### **4.2.2 Ketersediaan Prasarana Persampahan Kelurahan Benai Kecamatan Benai**

Ketersediaan prasarana persampahan di Kelurahan Benai yang dianalisis meliputi prasarana pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan.

##### **1. Pewadahan**

Menurut SNI 19-2454-2002 Tentang Tata Cara Teknik Operasional Persampahan Perkotaan, pewadahan sampah merupakan cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik individual maupun komunal. Wadah sampah individual umumnya ditempatkan di depan rumah atau bangunan lainnya. Sedangkan wadah sampah komunal ditempatkan di tempat terbuka yang mudah diakses. Sampah diwadahi sehingga memudahkan dalam pengangkutannya. Sistem pewadahan harus memperhatikan jenis sarana pewadahan yang digunakan, lokasi penempatan sarana pewadahan, keindahan dan kesehatan lingkungan.

Pewadahan yang digunakan untuk menampung sampah baik di daerah permukiman maupun non permukiman di Kelurahan Benai masih beragam dan bervariasi, sebagian besar pewadahan di Kelurahan Benai disediakan oleh masyarakat sendiri, kecuali untuk pewadahan sampah di jalan protokol dan fasilitas umum, sebagian besar disediakan oleh pemerintah itupun tidak jarang ditemukan pewadahan yang sudah tidak layak dipakai lagi.

Jenis pewadahan sampah yang digunakan di Kelurahan Benai yaitu tong dari bekas drum plastik, bak pasangan batu bata, lahan kosong. Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa pewadahan pada umumnya dilakukan tanpa pemisahan jenis sampah menjadi organik dan an-organik, namun sudah ada yang menyisahkan barang bekas untuk dijual atau diserahkan pada pengumpul barang-barang bekas.

Menurut SNI 19-2454-2002 Tentang Tata Cara Teknik Operasional Persampahan Perkotaan, persyaratan pewadahan adalah tidak mudah rusak dan kedap air kecuali kantong plastik atau kertas, mudah diperbaiki, ekonomis/mudah diperoleh atau dibuat oleh masyarakat, serta mudah dan cepat dikosongkan.

Adapun analisis terhadap masing-masing jenis pewadahan yang ada di Kelurahan Benai adalah sebagai berikut:

#### 1) Tong Sampah

Salah satu wadah sampah yang disediakan oleh pemerintah adalah tong sampah. Berdasarkan wawancara kepada Staff Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) bahwa menurut data pembukuan dari Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 pemerintah menyediakan pewadahan sampah khusus jenis tong sampah sebesar 33 buah, penyebaran tong sampah tersebut terletak di kawasan perdagangan, perkantoran dan pendidikan. (Sumber: Aditya Wahyu Prakoso salah satu staff di Dinas Lingkungan Hidup, wawancara tanggal 27 juli 2021).

Kapasitas tong sampah ini adalah 40 L untuk pelayanan 1 KK. Biasanya tong sampah yang terbuat dari drum plastik ini menggunakan penutup, maka sampah yang ada tidak akan menjadi media penyebaran penyakit sehingga dapat memenuhi aspek kesehatan dan dari sisi estetika dapat memenuhi sisi keindahan lingkungan.

Penggunaan tong sampah juga memudahkan operasional pengumpulan sampah oleh petugas karena mudah di angkat dan dikosongkan

Berdasarkan observasi lapangan peneliti menemukan jumlah tong sampah yang ada atau yang tersisa saat ini di Kelurahan Benai yaitu 15 buah yang tersebar di RT 003 sebanyak 13 buah, dimana kondisi tong sampah tersebut sebanyak 8 buah layak dan 5 buah tidak layak digunakan lagi. Untuk persebaran tong sampah lainnya yaitu di RT 002 sebanyak 2 buah, dimana 1 layak di pakai dan 1 lagi tidak layak digunakan lagi karena tong sampah tersebut rusak dan bocor.

Letak atau lokasi 15 buah tong sampah tersebut terletak di kawasan perdagangan (pasar, toko-toko) yang berada di Kelurahan Benai. Di permukiman Kelurahan Benai seperti RT 001, RT 004, RT 005, RT 006, RT 007, dan RT 008 pewadahan atau tong sampah tidak tersedia.



Gambar 4.3: Tong Sampah di Kelurahan Benai  
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2020

Berdasarkan wawancara kepada Kepala Bidang Pengelolaan, Persampahan, Pertamanan, dan Limbah B3 (Bahan Berbahaya, dan Beracun) Untuk tahun selanjutnya yaitu 2018-2020 pemerintah belum merefisi atau menambah kembali pewadahan sampah khusus jenis tong sampah. Pemerintah tidak menambah atau menyediakan disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya, karena pemerintah pusat lebih memfokuskan penyediaan pewadahan di pusat kota Teluk Kuantan.

Selain itu juga karena kurangnya biaya operasional untuk penyediaan pewadahan persampahan khususnya di Kelurahan Benai.

Tong sampah yang terbuat dari drum plastik merupakan pewadahan sampah yang termasuk ke kategori cukup baik, karena tong sampah ini mempunyai kelebihan yaitu tidak mudah rusak serta kedap air, harganya ekonomis serta mudah didapatkan. Biasanya tong sampah yang terbuat dari drum plastik ini menggunakan penutup, maka sampah yang ada tidak akan menjadi media penyebaran penyakit sehingga dapat memenuhi aspek kesehatan dan dari sisi estetika dapat memenuhi sisi keindahan lingkungan. Penggunaan tong sampah juga memudahkan operasional pengumpulan sampah oleh petugas karena mudah di angkat dan dikosongkan

Pewadahan jenis tong sampah yang disediakan pemerintah di Kelurahan Benai terbuat dari drum bekas. Kapasitas tong sampah ini sebesar 40 L untuk pelayanan 1 KK. Penempatan tong-tong sampah ini hanya disediakan di daerah komersial seperti depan toko-toko, dipinggir jalan, dan lain sebagainya.

Melihat kondisi eksisting persampahan yang ada saat ini dengan yang seharusnya ada kebutuhan pewadahan persampahan yang dimiliki oleh Kelurahan Benai masih kurang dan perlunya penambahan jumlah tong sampah.

## 2) Bak Sampah (TPS)

Bak sampah adalah Salah satu jenis pewadahan di Kelurahan Benai yaitu bak dengan kontruksi dari bata tanpa atap yang diberi lubang pintu dengan atau tanpa pintu, Ukuran rata-rata 3 m<sup>3</sup>. Di Kelurahan Benai Bak sampah ini digunakan sebagai wadah komunal. Bak sampah ini yaitu ditempatkan di dalam Pasar Benai karena lebih diupayakan dekat dengan sumber timbulan sampah.

Berdasarkan observasi lapangan dan wawancara peneliti menemukan bak sampah atau Tempat Penampungan Sementara (TPS) pada umumnya dilakukan tanpa pe

misahan jenis sampah menjadi organik dan an-organik, namun sudah ada yang menyisahkan barang bekas untuk dijual atau diserahkan pada pengumpul barang-barang bekas.

Menurut SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, Penggunaan Bak sampah pada umumnya mempunyai kelebihan karena sudah memenuhi aspek kesehatan dan keindahan lingkungan. Hal ini karena sampah tidak mudah berserakan dan tidak menjadi sarang penyakit. Disamping itu Bak sampah mempunyai keuntungan tidak mudah rusak dan kedap air.

Namun demikian, wadah jenis ini mempunyai kekurangan yaitu sulit dioperasionalkan serta membutuhkan waktu yang lebih lama dalam operasional pengumpulan sampah. Selain itu, seringkali bak sampah ini dijadikan tempat pembakaran sampah oleh warga sekitar. Hal ini disebabkan waktu pengambilan sampah oleh petugas kebersihan terlalu lama sehingga sampah menjadi menumpuk. Dari sisi harga bak sampah ini sebenarnya kurang ekonomis.

Berdasarkan Hasil pengamatan untuk bak sampah yang disediakan oleh pemerintah untuk sampah domestik dan non domestik terbuat dari batu bata semen yang letaknya berada di RT03 RW02 atau tepatnya di dalam Pasar Kelurahan Benai, kondisi bak sampah tersebut setengah hancur namun masih bisa dimanfaatkan. Bak sampah atau TPS ini tidak mampu menampung timbulan sampah yang dihasilkan dari Pasar Benai dan Sampah dari masyarakat Kelurahan Benai itu sendiri.

Masyarakat tidak mau membuang sampah di TPS dikarenakan berdasarkan hasil penelitian diketahui sebagian besar masyarakat di Kelurahan Benai merupakan masyarakat yang bertempat tinggal masih berjauhan dengan letak TPS yang disiapkan pemerintah yang mengakibatkan masyarakat bingung harus menempatkan sampahnya dimana. Tidak dapat dielakkan lagi masyarakat membuang sampahnya di

lahan-lahan kosong milik orang lain atau di tepi jalan, bahkan ada juga yang membuang sampah disungai kecil.

Ada juga masyarakat yang meletakkan atau membuang sampah tidak diletakkan dalam bak tetapi dibuang disekitar bak semen sehingga sampah yang ada berserakan di luar TPS.



Gambar 4.4: Bak sampah (Pasangan Batu Bata)

Kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan sampah juga akan mempengaruhi terhadap proses pengelolaan sampah secara keseluruhan. Dari hasil observasi terbukti masih adanya kebiasaan membuang sampah ke sungai, membuang ke pinggir jalan, atau di luar TPS yang telah disediakan dan juga membuang sampah di sembarangan seperti lahan kosong.

1. RT 001 – RW 001, yang berada di pinggir jalan terdapat lahan kosong milik warga yang berdekatan dengan rawa-rawa, letak tempat pembuangan sampah permukiman Kelurahan Benai ini terletak  $\pm$  20 m dari rumah penduduk yang menimbulkan bau yang tidak sedap dan membuat penduduk yang melewati jalan tersebut tidak nyaman.



Gambar 4.6: Lahan yang dijadikan tempat pembuangan sampah  
RT 001 – RW 001

2. RT 003 – RW 002, yang berada tepat didepan rumah penduduk Kelurahan Benai. kondisinya sudah hancur sehingga sampah berserakan disekitar TPS dan sampah yang lainnya jatuh ke selokan dekat TPS.



Gambar 4.7: Lahan yang dijadikan tempat pembuangan sampah  
RT 003 – RW 002

3. RT 006 – RW 003 , yang berada dilahan kosong berdekatan dengan sungai kecil, letak tempat pembuangan sampah ini  $\pm$  30 m dari rumah penduduk. Sampah yang tercampur dengan air sungai menimbulkan bau tidak sedap dan banyak di kerumuni lalat.



Gambar 4.8 Lahan yang dijadikan tempat pembuangan sampah

Kebiasaan ini di latar belakang oleh penyediaan pewadahan sampah tidak sampai ke permukiman warga dan hanya di sediakan di lokasi tertentu. Selain itu, masyarakat permukiman Kelurahan Benai yang tinggal jauh dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) menggunakan lahan kosong sebagai prasarana pewadahan sampah. Lahan kosong tersebut menimbulkan masalah karena menimbulkan bau yang tidak sedap dan membuat penduduk yang melewati jalan atau lahan tersebut menjadi tidak nyaman.

Berdasarkan wawancara kepala Kepala Lurah Kelurahan Benai *“Masih banyak masyarakat yang suka membuang sampah di sembarang tempat padahal telah disediakan TPS, hal ini cukup merepotkan dan menambah beban kerja petugas kami di lapangan”* (Sumber: Andi Kriastian, wawancara tanggal 6 oktober 2020).

Pendapat berbeda dikemukakan oleh masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan lahan kosong atau tempat pembuangan sampah liar:

*“Kami tahu membuang sampah disini tidak boleh dan mengganggu pemandangan dan kenyamanan masyarakat yang melewati jalan ini, tetapi kami bingung mau membuang sampah kemana lagi karena TPS terlalu jauh untuk dijangkau dan pemerintah juga tidak menyediakan TPS di sekitar sini”* (Sumber: Endang, wawancara tanggal 6 oktober 2020).

## **2. Pengumpulan**

Pengumpulan sampah adalah cara proses pengambilan sampah mulai dari tempat penampungan sampah (pewadahan) sampai ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Pengumpulan biasanya menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada kawasan tersebut, dapat dilakukan secara individual (Masing-masing rumah tangga) atau dapat dilakukan secara komunal. Pola pengumpulan sampah yang ada saat ini di Kelurahan Benai adalah menggunakan pola individual langsung dan pola individual tidak langsung.

Pola pengumpulan sampah menurut SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan,

- a. Pola individual langsung, dimana sampah dari setiap sumber sampah langsung di angkut ke TPA dengan truk pengangkut sampah (*Dump Truck*), tanpa melalui pemindahan ke TPS.
- b. Pola individual tidak langsung, dimana sampah dikumpulkan dari sumber sampah menggunakan motor sampah atau gerobak sampah. Selanjutnya diangkut ke TPS yang diletakkan di beberapa titik wilayah.
- c. Pola komunal langsung, dimana sampah dikumpulkan pada wadah seperti container kemudian dari wadah tersebut di angkut ke TPA.

Menurut SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, Pengumpulan sampah adalah proses penanganan sampah dengan cara pengumpulan dari masing-masing sumber sampah untuk diangkut ke TPS (Tempat Penampungan Sementara) atau pengolahan sampah skala kawasan, atau langsung ke TPA tanpa melalui proses pemindahan. Prasarana pengumpulan sampah mulai dari sumber sampah ke TPA dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung (*door to door*) atau secara tidak langsung (dengan menggunakan transfer depo/container) sebagai TPS.

Kelurahan Benai menggunakan pola individual langsung dan pola individual tidak langsung. Pola individual langsung dilakukan di wilayah pasar khususnya hari Pasaran Benai yaitu hari kamis dan hari minggu. Dimana, ketika hari pasaran otomatis timbulan sampah akan meningkat sehingga untuk meringankan pekerjaan petugas kebersihan maka dilakukan pola individual langsung ini. Sampah yang timbul akan langsung di kumpulkan di truk pengangkut tanpa melalui pemindahan ke TPS.

Untuk daerah permukiman Kelurahan Benai pemerintah tidak menyediakan peralatan atau kendaraan pengumpulan sampah karena belum adanya perintah atau

tugas dari pemerintah mengenang beberapa permasalahan yang ada seperti permasalahan pendanaan. Dimana pendanaan untuk sarana dan prasarana persampahan di Kelurahan Benai masih minim sehingga belum adanya penyediaan peralatan atau kendaraan untuk pengumpulan sampai ke permukiman masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat Kelurahan Benai menggunakan kendaraan pribadi untuk memindahkan atau membuang sampah dari sumber sampah ke lokasi pemindahan sampah untuk kemudian di angkut ke tempat pembuangan akhir. Tetapi, banyak juga masyarakat yang lebih memilih membakar sampah di lahan atau pekarangan rumah mereka.

Prasarana pengumpulan atau Tempat Penampungan Sampah (TPS) yang ada di Kelurahan Benai terdiri dari TPS pasangan batu bata, dan lahan kosong. Dari hasil observasi langsung ke lapangan, sebagian besar TPS yang ada di Kelurahan Benai adalah TPS yang terbuat dari batu bata yang berukuran 3 m<sup>3</sup>.

Dari observasi lapangan. TPS lahan kosong sering dijadikan sebagai tempat pembakaran sampah oleh masyarakat. Hal ini karena frekuensi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA yang cukup lama sekitar 2 kali dalam seminggu. Menurut hasil wawancara kepada masyarakat sekitar pengangkutan sampah di Kelurahan Benai terkadang hanya dilakukan 1 kali seminggu dan tidak optimal. Selain itu dengan frekuensi pengangkutan yang cukup lama maka sampah menjadi menumpuk dan mudah berserakan.

Tempat Penampungan Sementara (TPS) batu bata juga memiliki kekurangan, yaitu sulit dalam operasional pengangkutan sampah dengan menggunakan *dump truck* untuk di bawa ke TPA Sentajo Raya. Hal ini karena untuk memindahkan sampah dari TPS ke dalam truk memerlukan tenaga yang banyak serta membutuhkan

waktu yang lama sehingga menjadi kurang efisien. Namun demikian, TPS dari bak terbuka ini mempunyai harga yang ekonomis dan tahan lama.

### **3. Pengangkutan**

Alat atau kendaraan pengangkutan sampah di Kelurahan Benai adalah menggunakan *dump truck*. Kendaraan *dump truck* saat ini digunakan untuk mengangkut sampah yang ada di tong sampah, maupun TPS batu bata di Kelurahan Benai. *Dump truck* ini mempunyai kelebihan yaitu cocok untuk menangani sampah yang ada di pasar, bias *door to door*, dan pengoperasian lebih efisien dan efektif dibanding truk biasa. Selain kelebihan di atas, kendaraan *dump truck* juga mempunyai kekurangan yaitu dalam operasionalnya membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak yaitu 4-5 orang. Hal ini karena untuk memindahkan sampah dari TPS ke *dump truck* diperlukan personil yang banyak.

Menurut SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan *dump truck* mempunyai kelebihan yaitu hanya cocok untuk menangani sampah yang ada di pasar, bisa *door to door*, dan pengoperasian lebih efisien dan efektif dibanding truk biasa.

Selain kelebihan di atas, kendaraan *dump truck* juga mempunyai kekurangan yaitu dalam operasionalnya membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak yaitu 4-5 orang. Hal ini karena untuk memindahkan sampah dari TPS ke *dump truck* diperlukan personil yang banyak. Disamping itu, untuk menghindari sampah yang beterbangan saat diangkut dengan *dump truck* ke TPA maka masih diperlukan penutup bak.

Pengangkutan tidak boleh ditunda karena hal ini akan menambah beban pengangkutan berikutnya dan beresiko menimbulkan gangguan kenyamanan lingkungan di sekitar tempat penyimpanan. Selain itu dengan frekuensi

pengangkutan yang cukup lama maka sampah menjadi menumpuk dan mudah berserakan.

Sistem pengangkutan yang diterapkan pada pengelolaan sampah di Kelurahan Benai adalah dengan menggunakan 1 armada pengangkutan yaitu *dump truck*. Kendaraan *dump truck* ini digunakan untuk mengangkut sampah yang ada di Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kawasan pasar, pertokoan ataupun di jalan utama.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Frekuensi pengangkutan sampah untuk sampah Pasar dilakukan 2 kali seminggu, setiap hari pasar yaitu pada hari kamis dan hari minggu. Namun, pengangkutan sampah ini sering kali tidak tepat waktu dan terkadang tidak ada pengangkutan sama sekali dalam satu minggu. Masalah tersebut disebabkan oleh waktu pengangkutan belum efektif dan terkadang bentrok dengan waktu pengangkutan daerah lain, selain itu disebabkan juga oleh pendanaan yang sangat minim.

Sedangkan sampah permukiman Kelurahan Benai tidak dilakukan pengangkutan karena kebijakan pemerintah belum sampai untuk permukiman Kelurahan Benai. Pengangkutan sampah permukiman yang tidak dilakukan mengakibatkan masyarakat cenderung membuang sampah di lahan/tanah kosong yang ada disekitar wilayah pemukiman bahkan ke sungai yang ada di Kelurahan Benai.

Jenis armada pengangkutan yang disediakan untuk pengangkutan sampah Kelurahan Benai ke TPA Sentajo Raya adalah *Dumb Truck*, yang berjumlah 1 unit dan memiliki muatan volume 6 m<sup>3</sup>. Berdasarkan pengamatan di lapangan, untuk setiap kendaraan *dump truck* diperlukan tenaga pengangkutan sebanyak 4-5 orang yang bertugas memindahkan sampah dari TPS ke dalam truk.



Gambar 4.9: Armada Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPA

Kendaraan *dump truck* ini merupakan modifikasi dari truck biasa, bak truck dapat digerakkan secara hidrolik sehingga proses bongkar sampah bisa efektif, sedangkan lama operasionalisasi sama dengan truck biasa. Bak terbuat dari baja dengan kapasitas bervariasi 6 m<sup>3</sup>.

Pengelolaan persampahan masyarakat di Kelurahan Benai diperoleh dalam wawancara dengan informan terkait yaitu:

*“Sampah yang telah dikumpulkan dibuang secara langsung tidak dilakukan pengelolaan seperti pemilihan, daur ulang sampah atau sebagainya. Karena, masih kurangnya fasilitas yang ada dalam pengelolaan sampah tersebut. Sehingga sampah-sampah yang telah dikumpulkan dibuang secara langsung dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengelolaan dan apabila sampah ditempat pembuangan telah menumpuk maka akan dilakukan pembakaran sampah untuk mengurangi penumpukan tersebut”*(Sumber: Yulisman Wahid, wawancara tanggal 6 oktober 2020).

Dari hasil wawancara tersebut bahwa pengelolaan sampah di Kelurahan Benai masyarakat tidak melakukan pengelolaan sampah terlebih dahulu sehingga sampah yang ada langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah setelah sampah menumpuk barulah dilakukan pembakaran sampah.

Sedangkan dari segi tingkat pengetahuan masyarakat dilingkungan permukiman ini didapat dalam wawancara dengan informan terkait.

*“jujur untuk saya pribadi tidak tahu tentang peraturan dalam pengelolaan persampahan yang ada.”* (Sumber: Umi Kalsum, wawancara tanggal 6 oktober 2020).

Dari hasil wawancara tersebut bahwa pengetahuan masyarakat terdapat yang rendah karena masyarakat yang penulis temui tidak mengetahui tentang peraturan pengelolaan sampah yang berlaku. Prasarana Pengumpulan sampah yang disediakan pemerintah untuk wilayah Kelurahan Benai memiliki TPS berupa TPS permanen yang terbuat dari batu bata diletakkan di Pasar Benai sebanyak 2 tempat. Untuk mengetahui kondisi prasarana persampahan kelurahan benai berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara terkait yaitu:

*“Iya ada. Ada 2 TPS yang disediakan pemerintah yang terbuat dari batu bata yang di plester selain itu TPS tersebut sudah ± 5 tahun umurnya. Kondisi TPS ini sudah mulai rusak dan pecah-pecah dan juga TPS ini tidak dapat menampung sampah yang ada.”* (Sumber: Gusriani salah satu staff di Dinas Lingkungan Hidup, wawancara tanggal 5 oktober 2020).

Sehingga banyak sampah yang berserakan di luar TPS yang mengakibatkan pemandangan yang kurang menarik dan menimbulkan bau busuk yang membuat tidak nyaman ketika melewati TPS tersebut. Berdasarkan wawancara kepada Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Limbah B3, Suryan Hendri.ST bahwa penyebaran pewardahan sampah di Kelurahan Benai lebih difokuskan pada kawasan pusat kota, pusat perekonomian dan ruas jalan utama. Hal ini didasarkan pada pertimbangan ruas jalan utama lebih sering dilalui oleh kendaraan dan masyarakat yang berlalu lalang.

Jarak atau letak TPS yang disediakan pemerintah berada jauh dari pemukiman masyarakat yang mengakibatkan masyarakat bingung harus menempatkan sampahnya dimana. Tidak dapat dielakkan lagi masyarakat membuang sampahnya pada lahan-lahan kosong milik orang lain atau di tepi jalan. Kebiasaan membakar sampah secara bebas memang sudah membudaya di masyarakat Kelurahan Benai. Mereka belum menyadari bahwa jenis sampah saat ini berbeda dengan sampah zaman dulu, yang di dominasi sampah seperti plastik, karet, logam, kaca dan

sebagiannya. Apabila sampah tersebut dibakar maka akan mengeluarkan gas beracun yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat yang menghirupnya dan memperburuk kualitas lingkungan udara.

Pemahaman masyarakat Kelurahan Benai terhadap konsep 3R, yaitu *reuse* (memakai kembali barang bekas yang masih bisa dipakai), *reduce* (berusaha mengurangi sampah) dan *recycle* (mendaur ulang sampah agar dapat dimanfaatkan) juga masih rendah. Akibatnya produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat semakin melimpah dan menumpuk dimana-mana.

#### **4.2.3 Analisis Pengelolaan Persampahan Dalam Aspek Kelembagaan, Aspek Retribusi, dan Aspek Pengaturan di Kelurahan Benai**

Pengelolaan sampah di permukiman pada dasarnya dilihat dari komponen sub sistem yang saling mendukung dan berinteraksi. Komponen tersebut adalah aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, dan aspek hukum (SNI 3242-2008 tentang pengelolaan persampahan di permukiman).

##### **1. Aspek Kelembagaan**

Menurut SNI 2454-2008 tentang Pengelolaan Persampahan di Permukiman, instansi atau kelembagaan yang menangani dan bertanggung jawab dalam pengelolaan persampahan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan masing-masing Kota/Kabupaten.

Dalam hal ini Kabupaten Kuantan Singingi termasuk Kelurahan Benai ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengelolaan Persampahan. Pertamanan, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Dari hasil observasi dan wawancara di instansi terkait seperti Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan dan Dinas Lingkungan Hidup hasil yang didapatkan adalah instansi atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan teknik operasional sampah di Kecamatan Benai

sepenuhnya ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Dalam suatu pengelolaan persampahan, aspek kelembagaan sangat penting agar pengelolaan dapat berjalan dengan baik. Struktur organisasi harus dapat memperlihatkan secara jelas alur koordinasi baik secara vertical maupun horizontal, kewenangan dalam penggunaan anggaran, dan tata laksana kerja harus memuat dengan jelas fungsi dan tugas masing-masing personil. Armada pengangkutan sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah *dump truck* yang berjumlah 1 unit dengan kondisi layak di pakai. Untuk personil nya sendiri Dinas Lingkungan Hidup menyediakan hanya 4 orang personil untuk daerah Kelurahan Benai. Namun, jika dilihat di lapangan, masih banyak sampah yang belum di angkut sepenuhnya.

Dalam suatu pengelolaan persampahan, aspek kelembagaan sangat penting agar pengelolaan dapat berjalan dengan baik. Struktur organisasi harus dapat memperlihatkan secara jelas alur koordinasi baik secara vertical maupun horizontal, kewenangan dalam penggunaan anggaran, dan tata laksana kerja harus memuat dengan jelas fungsi dan tugas masing-masing personil.

Tepat waktunya pengangkutan persampahan pun menjadi permasalahan utama di Kelurahan Benai, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang tinggal dekat dengan penampungan sampah mengatakan bahwa pengangkutan sampah dari TPS ke TPA itu terkadang tidak tepat waktu yang menyebabkan semakin hari sampah menumpuk dan menyebabkan sampah berserakan dan menimbulkan bau yang tidak sedap . Hal ini disebabkan juga karena kurangnya jumlah personil dan armada pengangkutan sampah menuju TPA.

Diharapkan Dinas Lingkungan hidup lebih memperhatikan dan meninjau ketersediaan prasarana persampahan dan pengelolaan sampah di Kelurahan Benai.

Dan diharapkan pula untuk dapat menambah jumlah personil dan armada dalam hal pengangkutan sampah di Kelurahan Benai ini.

## **2. Aspek Retribusi**

Salah satu aspek pengelolaan persampahan adalah aspek retribusi. Retribusi merupakan salah satu bentuk nyata partisipasi masyarakat di dalam membiayai program pengelolaan persampahan. Retribusi ini dibayarkan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan persampahan mulai dari penyediaan wadah, pengangkutan, serta kegiatan kebersihan lainnya seperti penyapu jalan, sedot tinja, penyiram tanaman dan pepohonan. Sedangkan setiap daerah memiliki retribusi yang berbeda-beda.

Menurut SNI 2454-2008 tentang Pengelolaan Persampahan di Permukiman aspek retribusi dalam pengelolaan persampahan mempunyai peran sangat penting dalam pengelolaan persampahan. Berbagai masalah pengelolaan persampahan timbul pada umumnya disebabkan oleh adanya keterbatasan dana, seperti keterbatasan dana investasi peralatan, dana operasi dan pemeliharaan.

Kebutuhan biaya pengelolaan sampah ini akan meningkat sejalan dengan tingkat pelayanan atau volume sampah yang harus dikelola. Pihak institusi atau kelembagaan pengelolaan sampah dituntut untuk dapat merencanakan kebutuhan dana secara akurat setiap tahunnya agar roda pengelolaan dapat terus berjalan sesuai dengan tujuan utamanya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Pertamanan dan Limbah B3, tidak maksimalnya pola pengangkutan sampah dengan *dump truck* adalah karena masih minimnya pembiayaan yang disediakan untuk operasional kendaraan tersebut, sehingga tidak dapat meningkatkan jangkauan pelayanan dengan menambah ritasi. Selain itu, rendahnya kinerja pengelolaan

sampah disebabkan oleh belum tersediannya anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana persampahan seperti gerobak sampah, penambahan tong sampah sesuai jangkauan pelayanan sampah.

Kondisi pemasukan dari retribusi yang ada saat ini sangat tidak seimbang dibandingkan dengan biaya operasional kendaraan biaya/retribusi yang diperoleh setiap bulan sekitar Rp. 1.200.000,-, tidak sebanding dengan biaya operasional pengelolaan sampah dan gaji tenaga lapangan yang mencapai sebesar Rp. 15.000.000,- setiap bulan. Hal ini menyebabkan dalam operasional pengelolaan sampah tetap mengandalkan pada subsidi dari pemerintah.

Dari hasil penelitian, masyarakat yang membayar retribusi atau iuran kebersihan antara Rp. 2.000,- sampai dengan Rp. 12.000,-. Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Bahwa, bagian kelima Struktur dan Besarnya tarif pasal 8 tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebesar:

Tabel 4.7: Tarif Retribusi Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2012

No	Bangunan	Tarif Retribusi/Bulan
1	Rumah Kediaman a. Rumah sangat sederhana b. Rumah sederhana c. Rumah menengah d. Rumah mewah	Rp. 6.000/bulan Rp. 8.000/bulan Rp. 12.000/bulan Rp. 25.000/bulan
2	Rumah dan toko (ruko) a. Satu lantai b. Dua lantai c. Tiga lantai d. Empat lantai	Rp. 25.000/bulan Rp. 30.000/bulan Rp. 33.000/bulan Rp. 38.000/bulan
3	Laundry	Rp. 25.000/bulan
4	Warnet/rental	Rp. 25.000/bulan
5	Depot air minum	Rp. 25.000/bulan
6	Show room/mobil a. Kecil b. Sedang	Rp. 25.000/bulan Rp. 30.000/bulan

	c. Besar	Rp. 33.000/bulan
7	Rumah makan/warung a. Restaurant b. Rumah makan c. Warung dan lain-lain yang sejenis	Rp. 70.000/bulan Rp. 40.000/bulan Rp. 25.000/bulan
8	Sarana Kesehatan a. Rumah sakit b. Puskesmas c. Poliklinik d. Apotik/ Toko Obat e. Rumah Bersalin f. Dan lain-lain yang sejenisnya	Rp. 100.000/bulan Rp. 25.000/bulan Rp. 25.000/bulan Rp. 25.000/bulan Rp. 75.000/bulan Rp. 25.000/bulan
9	Kantor a. Kantor pemerintah b. Kantor swasta/perusahaan	Rp. 25.000/bulan Rp. 50.000/bulan
10	Usaha Lainnya a. Salon b. Bengkel mobil c. Bengkel motor d. Bengkel sepeda	Rp. 25.000/bulan Rp. 33.000/bulan Rp. 30.000/bulan Rp. 25.000/bulan
11	Pergudangan a. Kecil b. Sedang c. Besar	Rp. 25.000/bulan Rp. 50.000/bulan Rp. 75.000/bulan

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2012

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Benai mengatakan bahwa mereka keberatan dengan pemungutan iuran retribusi khususnya di permukiman Kelurahan Benai. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya penyediaan wadah persampahan, pengangkutan sampah di permukiman dan lain sebagainya.

Lain halnya dengan masyarakat yang tinggal di pinggir jalan utama atau masyarakat yang mempunyai warung atau toko di dekat Pasar Benai. Mereka rela atau mau mengeluarkan biaya retribusi untuk pemerintah untuk biaya kebersihan setempat.

#### **4. Aspek Hukum dan Peraturan**

Aspek pengaturan diperlukan untuk menunjang terlaksananya program-program pengelolaan sampah. Aspek pengaturan berfungsi sebagai pemberi arah dan dorongan agar masyarakat benar-benar memperhatikan akan pentingnya pengelolaan sampah, dimulai dari sumber sampah hingga tahapan pemrosesan akhirnya.

Menurut SNI 2454-2008 tentang Pengelolaan Persampahan di Permukiman untuk memenuhi pengelolaan persampahan yang maksimal dan terkoordinasi dengan baik, maka perlu landasan hukum yang memadai. Keberhasilan pengelolaan persampahan juga perlu didukung oleh peraturan-peraturan yang melibatkan wewenang dan tanggung jawab badan pengelola serta partisipasi masyarakat.

Menurut SNI 3242-2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman, bahwa kabupaten/kota setidaknya memiliki peraturan mengenai:

- 1) UU RI no 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
- 2) Perda tentang pembentukan organisasi persampahan
- 3) Perda tentang kebersihan dan ketertiban umum wilayah
- 4) Perda tentang retribusi kebersihan
- 5) Peraturan walikota/bupati tentang pelaksanaan swakelola kebersihan wilayah
- 6) Peraturan walikota/bupati tentang penetapan jadwal waktu membuang dan pengangkutan sampah, serta ketentuan dan tata cara pemotongan pohon perindang.

Dalam wawancara dengan Kabid Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Limbah B3 yaitu Bapak Suryan Hendri, ST menjelaskan bahwa pengaturan yang dipakai dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kuantan Singingi termasuk Kelurahan Benai adalah memakai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Permasalahan dalam aspek hukum dan peraturan dalam pengelolaan persampahan di Kelurahan Benai adalah belum adanya perda khusus tentang pengelolaan kebersihan persampahan dan Perda tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban kota Kabupaten Kuantan Singingi atau Kelurahan Benai. Sehingga, diharapkan untuk kedepannya pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup selaku penanggung jawab pengelolaan persampahan membuat perda khusus terkait pengelolaan persampahan agar dapat direalisasikan dengan baik.

Hukum dan peraturan terkait pengelolaan persampahan ini bermanfaat untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman, indah dan bersih dari sampah dalam bentuk pengurangan dan penanganan sampah. Peraturan yang ada saat ini diharapkan masyarakat dapat mematuhi dan menambah pendapatan daerah. Namun, Berdasarkan hasil wawancara masih banyak yang tidak mengetahui tentang perda tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk ketersediaan prasarana persampahan di kelurahan benai dapat disimpulkan:
  - a. Pewadahan sampah yang digunakan untuk menampung sampah di Kelurahan Benai saat ini tidak memadai karena pewadahan yang di sediakan pada tahun 2017 lalu sampai saat ini di tahun 2021 belum ada penambahan sama sekali. TPS berukuran 3 m<sup>3</sup> yang ada di Kelurahan Benai saat ini belum memadai, atau tidak disesuaikan dengan jumlah penduduk dan timbulan sampah yang ada. Lokasi penempatan TPS juga jauh dari permukiman Kelurahan Benai sehingga masyarakat lebih memilih mengelola sendiri sampahnya.
  - b. Pengumpulan sampah, untuk pola pengumpulan sampah yang diterapkan di Kelurahan Benai menggunakan pola individual tidak langsung. Dimana sampah dibuang ke TPS terdekat, sementara untuk sebagian masyarakat mengelola sendiri sampahnya dengan membuang sampah ke lahan kosong atau menumpuk dan membakar sampah di depan rumah masyarakat itu sendiri. Hal ini disebabkan tidak adanya pelayanan pengelolaan persampahan di permukiman Kelurahan Benai.
  - c. Pengangkutan sampah, di Kelurahan Benai alat atau kendaraan pengangkutan sampah yang disediakan oleh pemerintah hanya 1 yaitu

berupa *Dump Truck* yang beroperasi dengan intensitas pengangkutan 1-2 kali seminggu yang beroperasi di jalan utama dan dalam Pasar Benai. Untuk daerah permukiman belum adanya pelayanan pengelolaan sampah. Intensitas pengangkutan yang ada seringkali terjadi keterlambatan dalam pengangkutan sampah yang mengakibatkan sampah menumpuk dan berserakan.

2. Untuk pengelolaan persampahan dalam aspek kelembagaan, aspek retribusi, aspek hukum dan peraturan, dapat disimpulkan:
  - a. Aspek kelembagaan, kurangnya perhatian dan prioritas dalam pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Bidang Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Limbah B3.
  - b. Aspek retribusi, karena pengelolaan persampahan tidak terprioritas di permukiman Kelurahan Benai maka retribusi atau pemungutan kebersihan tidak berjalan dengan lancar. Hal ini juga menyebabkan pendapatan daerah menurun sehingga dalam pengelolaannya pun ikut menurun.
  - c. Aspek hukum, belum adanya undang-undang khusus mengenai pengelolaan persampahan khusus untuk kabupaten kuantan singing.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas untuk meningkatkan ketersediaan prasarana persampahan Kelurahan Benai, maka peneliti menyampaikan beberapa saran, diantaranya:

1. Diharapkan ketersediaan prasarana yang ada di Kelurahan Benai saat ini perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam upaya meningkatkan pelayanan dibidang kebersihan. Dan juga untuk pemerintah diharapkan menambah pewadahan sampah secara merata untuk mengumpulkan sampah agar mengurangi timbulan sampah yang berserakkan.
2. Pengelolaan persampahan dalam aspek kelembagaan, aspek retribusi, aspek hukum dan peraturan:
  - a. Kelembagaan, diharapkan pemerintah lebih memperhatikan bagaimana kondisi persampahan di luar ibu kota. Setidaknya pemerintah meminta laporan perkembangan pengelolaan persampahan di setiap daerah agar dapat diselesaikan permasalahan yang ada.
  - b. Retribusi, diharapkan pemerintah daerah memberikan pengertian dan arahan agar masyarakat mau membayar iuran retribusi/kebersihan. Dan untuk masyarakat, diharapkan untuk mengerti dan membayar iuran retribusi yang berguna untuk memberikan pelayanan pengelolaan persampahan seperti penyediaan pewadahan.
  - c. Hukum dan peraturan, diharapkan untuk pemerintah membuat peraturan daerah tentang pengelolaan persampahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori, 2014, *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung : alfabeta
- Badan Pusat statistik, 2017, *Kecamatan Benai dalam Angka*, Kabupaten Kuantan Singingi
- Badan Pusat statistik, 2019, *Kecamatan Benai dalam Angka*, Kabupaten Kuantan Singingi
- Bungin. Burhan, 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif "*Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*". Jakarta
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi, *pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Limbah B3*, 2020
- Dinas pasar kebersihan dan pertamanan, *pengelolaan persampahan kabupaten kuantan singing*, 2011
- Dobiki, Joflius, 2008. *Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Pulau Kumodan Pulau Kakara di Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal Spasial, Volume 5
- Faturrahman, 1997, Tesis *Evaluasi Kinerja Pengelolaan Infrastruktur Persampahan Kota Cirebon*, Cirebon
- Grigg, N.S., 1998. *Infrastructure Engineering And Management*, New York : J. Wiley.
- Haryono, 2002, *Kinerja Pelayanan Persampahan di Kota Yogyakarta*, Undip, Semarang.
- Irman, 2004. *Peran Serta Masyarakat Dalam Teknik Operasional Sampah di Kota Padang*, Megister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, UNDIP, Semarang.
- J. Kodoatie, Robert. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur Edisi Revisi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- KBBI, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/analisis>
- KBBI, 2020. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <https://kbbi.web.id/sedia-2>
- Maryati. Deliyanto, 2013. *Prasarana Wilayah dan Kota*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Masikki, M DG Nurwahdaniar. 2013. "*Analisis Kebutuhan Prasarana Persampahan Di Kota Luwuk*". Fakultas Teknik. Universitas Hasanuddin. Makasar

- Sedarmayanti, Mahmud, 2011. *Dokumen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Standar Nasional Indonesia, 2008. *Tentang Besaran Timbulan Sampah Berdasarkan Klasifikasi Kota*. SNI SNI 3252-2008. Jakarta
- Standar Nasional Indonesia, 1994. *Tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah*. SNI 03-3241-1994. Jakarta.
- Standar Nasional Indonesia, 1994. *Tentang Tipe atau jenis sampah*. SNI-19-3241-1994, Yayasan LPMB Bandung, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta
- Standar Nasional Indonesia, 1994. *Tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman*. SNI 03-3242-1994. Jakarta
- Standar Nasional Indonesia, 2002. *Tentang Tata Cara Teknik Operasional Sampah Perkotaan*. SNI 19-2454-2002. Jakarta.
- Standar Nasional Indonesia, 1993. *Tentang Spesifikasi Timbulan Sampah*. SNI S-04-1993-03. Jakarta.
- Standar Nasional Indonesia, 2004. *Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan*. SNI 03-1733-2004. Jakarta.
- Syafrudin 2001, *Pengelolaan Limbah Padat (Sampah) Perkotaan*, Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Undip, Semarang .
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta
- Tato, Syahriar, 2015, *Evaluasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Gowa Studi Kasus Kecamatan Sombu Opu*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol 4-2, Makasar, UIN Allaudin

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

**LAMPIRAN 1**  
**DOKUMENTASI**



Kondisi Sampah di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kelurahan Benai



Lahan Kosong yang dijadikan tempat Pembuangan Sampah (TPS) di RT001/RW001



Lahan Kosong yang dijadikan tempat Pembuangan Sampah (TPS) di RT002/RW001



Lahan Kosong yang dijadikan tempat Pembuangan Sampah (TPS) di RT003/RW002



**Wawancara Bersama Kabid Pengelolaan  
Persampahan, Pertamanan, dan Limbah B3  
Kabupaten Kuantan Singingi**



**Wawancara Bersama Sekretaris Kecamatan  
Benai Kabupaten Kuantan Singingi**



**Wawancara Bersama Kepala Lurah  
Kelurahan Benai Kecamatan Benai  
Kabupaten Kuantan Singingi**



**Wawancara Bersama Ketua Lingkungan  
Kelurahan Benai Kecamatan Benai  
Kabupaten Kuantan Singingi**



Wawancara Bersama Masyarakat  
Kelurahan Benai Kecamatan Benai  
Kabupaten Kuantan Singingi



Wawancara Bersama Masyarakat  
Kelurahan Benai Kecamatan Benai  
Kabupaten Kuantan Singingi



Observasi Lapangan di Lokasi Penelitian Kelurahan Benai  
Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi

## LAMPIRAN 2

### PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditunjukkan dalam rangka untuk mencari data penelitian tentang “Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi”. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk melakukan analisis terhadap masalah penelitian. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut:

Pedoman wawancara untuk informan dari instansi terkait dan masyarakat pilihan:

1. Apakah pemerintah menyediakan pewadahan sampah (tempat sampah) untuk warga Kelurahan Benai?
2. Dengan pewadahan yang ada apakah sudah cukup untuk menampung timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.
3. Apakah pemerintah menyediakan prasarana pengumpulan sampah?
4. Apa saja alat angkut yang digunakan dan berapa jumlah alat angkut yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk membuang atau mengambil sampah di TPS Kelurahan Benai? Dan berapa besaran timbulan sampah sekali angkut nya?
5. Bagaimana retribusi persampahan di Kelurahan Benai?
6. Apa saja lembaga atau instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan persampahan di Kelurahan Benai?
7. Apakah ada peraturan atau hukum yang mengatur tentang persampahan di Kelurahan Benai?
8. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan?
9. Apakah ada keluhan tersendiri dari pemerintah Kelurahan Benai mengenai persampahan disana?

## **PEDOMAN WAWANCARA MASYARAKAT**

1. Bagaimana pengelolaan persampahan di Kelurahan Benai?
2. Apakah pemerintah menyediakan pewadahan sampah (tempat sampah) untuk warga Kelurahan Benai?
3. Tempat pembuangan sampah bapak/ibu dirumah menggunakan pewadahan apa?
4. Dengan pewadahan yang ada apakah sudah cukup untuk menampung timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.
5. Apakah pemerintah menyediakan prasarana pengumpulan sampah?
6. Apa saja alat angkut yang digunakan dan berapa jumlah alat angkut yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk membuang atau mengambil sampah di TPS Kelurahan Benai? Dan berapa besaran timbulan sampah sekali angkut nya?
7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai lahan kosong yang dijadikan tempat pembuangan sampah?
8. Apakah bapak/ibu tau mengenai peraturan pengelolaan persampahan?

1.

## LAMPIRAN

### DAFTAR INFORMAN WAWANCARA

#### 1. Informan kunci dari instansi terkait

No	Nama	Jabatan	Intansi
1	Suryan Hendry, ST	Kabid Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
2	Gusrion	Staff Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
3	Aditya Wahyu Prakoso	Staff Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup
4	Faizal Indra, S.Pr	Sekretaris Kecamatan	Kantor Camat Benai
5	Jasmi	Pelaksana Seksi TRAMTIB	Kantor Camat Benai
6	Hengki Lendra Elmi, SH	Kasi Pemerintahan	Kantor Camat Benai
7	Andi Kristian,S,Sos	Kepala Lurah Kelurahan Benai	Kantor Lurah Benai
8	Novita Sari	Staff Kantor Lurah Kelurahan Benai	Kantor Lurah Benai

#### 2. Informan dari masyarakat Kelurahan Benai

No	Nama	RT/RW	No	Nama	RT/RW
1	Riko Rinando	RT 001 – RW 001	48	Alber	RT 005 – RW 003
2	Muslimin	RT 001 – RW 001	49	Irhandi	RT 005 – RW 003
3	Suardi	RT 001 – RW 001	50	Misrayuli. Spd	RT 005 – RW 003
4	Supardi	RT 001 – RW 001	51	Suraidah	RT 005 – RW 003
5	Eti Falmi	RT 001 – RW 001	52	Yuliastri	RT 005 – RW 003
6	Atika Rahman	RT 001 – RW 001	53	Juni Liusman	RT 005 – RW 003
7	Hendrianto	RT 001 – RW 001	54	Zulkarnaini	RT 005 – RW 003
8	Junrizal	RT 001 – RW 001	55	Vanni	RT 006 – RW 003
9	Irawan	RT 001 – RW 001	56	Herna Hazmi	RT 006 – RW 003
10	Endang	RT 001 – RW 001	57	Ali Amran	RT 006 – RW 003
11	Anasrun	RT 001 – RW 001	58	Alfauzan	RT 006 – RW 003
12	Delsanita	RT 001 – RW 001	59	Anaswar	RT 006 – RW 003
13	Miliya	RT 001 – RW 001	60	Desi afridawati	RT 006 – RW 003
14	Rosmida	RT 001 – RW 001	61	Erni Tuti	RT 006 – RW 003
15	Maria Saleh	RT 001 – RW 001	62	Yulisman	RT 006 – RW 003
16	Marlis Latief	RT 002 – RW 001	63	M.Dinir	RT 006 – RW 003
17	Safantri	RT 002 – RW 001	64	Umi Klasum	RT 006 – RW 003
18	Sabirin	RT 002 – RW 001	65	Ratna Riawati	RT 006 – RW 003

19	Emyasda	RT 002 – RW 001	66	Suharto	RT 006 – RW 003
20	Yulisman W.	RT 002 – RW 001	67	Happy Irsan	RT 007 – RW 004
21	Amrizal F.	RT 002 – RW 001	68	Jonedi	RT 007 – RW 004
22	Edi Aprizal	RT 002 – RW 001	69	Helpindra	RT 007 – RW 004
23	Sumantri	RT 002 – RW 001	70	Dasiah	RT 007 – RW 004
24	Purnomo	RT 002 – RW 001	71	Abdul Doni	RT 007 – RW 004
25	Hendri	RT 002 – RW 001	72	Darson	RT 007 – RW 004
26	Syafri	RT 003 – RW 002	73	Novita Sari	RT 007 – RW 004
27	Deska Putra	RT 003 – RW 002	74	Nuryulisman	RT 007 – RW 004
28	Alexi	RT 003 – RW 002	75	Delta Faizen	RT 007 – RW 004
29	Miswan	RT 003 – RW 002	76	Fadrizal	RT 007 – RW 004
30	Nur Aini	RT 003 – RW 002	77	Andrianto	RT 007 – RW 004
31	Naswer	RT 003 – RW 002	78	Sadik Pramono	RT 007 – RW 004
32	Edwar	RT 003 – RW 002	79	Dasril	RT 008 – RW 004
33	Satria Budi	RT 003 – RW 002	80	Suhardi	RT 008 – RW 004
34	Rendi Putra	RT 003 – RW 002	81	Elismawati	RT 008 – RW 004
35	Oda Rima	RT 004 – RW 002	82	Jomaris	RT 008 – RW 004
36	Kiki Aswandi	RT 004 – RW 002	83	Dedi	RT 008 – RW 004
37	Yanri	RT 004 – RW 002	84	Sinel	RT 008 – RW 004
38	Agus Salim	RT 004 – RW 002	85	Siti Hawa	RT 008 – RW 004
39	Neni Andriani	RT 004 – RW 002	86	Yuslidar	RT 008 – RW 004
40	Heri	RT 004 – RW 002	87	Hendri	RT 008 – RW 004
41	Paiman	RT 004 – RW 002	88	Sopian Hardi	RT 008 – RW 004
42	Rosmawati	RT 004 – RW 002	89	Ganti Chaniago	RT 008 – RW 004
43	Farida	RT 004 – RW 002	90	Asrisal	RT 008 – RW 004
44	Amran Arif	RT 004 – RW 002	91	Erlangga	RT 008 – RW 004
45	Adrian	RT 005 – RW 003	92	Yurnalis	RT 008 – RW 004
46	Nasikin	RT 005 – RW 003	93	Kasdi	RT 008 – RW 004
47	Anizarliati	RT 005 – RW 003	94	Paiman	RT 008 – RW 004

## LAMPIRAN 4

### HASIL WAWANCARA

#### A. Identitas Informan Dinasi Lingkungan Hidup

1. Nama : Suryan Hendri, ST
2. Jabatan : Kabid Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Limbah B3

#### B. Daftar Pertanyaan dan Jawaban

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pemerintah menyediakan pewadahan sampah (tempat sampah) untuk warga Kelurahan Benai?	Jika untuk warga permukimannya belum ada penyediaan pewadahan. Namun, untuk warga sekitar pasar atau ditepi jalan utama atau jalan raya pemerintah menyediakan pewadahan persampahan. Jenis pewadahan itu sendiri yaitu tong sampah bekas drum plastik. Dan juga tahun ini pemerintah ada program menyediakan 30 unit pewadahan sampah dalam 1 unit ini ada 5 tong sampah yang telah dibagi beberapa jenis sampah untuk wilayah-wilayah tertentu. Untuk Kelurahan Benai Sendiri khususnya pasar benai hanya 1 unit karena pemerintah konsentrasi di kota taluk kuantan.
2	Dengan pewadahan yang ada apakah sudah cukup untuk menampung timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.	Pastinya belum cukup. Karena untuk TPS atau Tong sampah memang kurang. Karena rencana program kita ada untuk memenuhi penyediaan pewadahan persampahan namun karena pengurangan dana yang disebabkan pandemic ini rencana kita belum bias direalisasikan dengan baik.
3	Apakah pemerintah menyediakan prasarana pengumpulan sampah?	TPS di Kelurahan Benai ada 2. Itu TPS semi permanen yang terbuat dari batu bata yang disemen. Letak TPS nya sendiri berada di pasar Benai. TPS yang ada ini berukuran kurang lebih 3m <sup>2</sup> , penambahan TPS nya sendiri untuk saat ini belum ada ya karena 1 dan 2 hal tadi.
4	Apa saja alat angkut yang digunakan dan berapa jumlah alat angkut yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk membuang atau mengambil sampah di TPS Kelurahan Benai? Dan berapa besaran timbulan sampah sekali angkut nya?	Alat angkut yang digunakan pemerintah untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA adalah damp truck. Pengangkutan tersebut dilakukan 2 kali seminggu. Besaran timbulan sekali angkut ± 2 ton. Kondisi armada pengangkutan, tetapi masih ada kekurangan.
5	Bagaimana retribusi persampahan di Kelurahan Benai?	Ya, kami ada memungut biaya retribusi atau iuran untuk kebersihan Kelurahan Benai yang wakikan ke pihak Kelurahan.

6	Apa saja lembaga atau instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan persampahan di Kelurahan Benai?	Pengelolaan persampahan di kelurahan benai sepenuhnya ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup khususnya bidang Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Limbah B3.
7	Apakah ada peraturan atau hukum yang mengatur tentang persampahan di Kelurahan Benai?	Untuk peraturan khusus pengelolaan persampahan belum ada. Untuk saat ini masih dalam proses pembuatan. Nah saat ini DLH memakai UU no 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan juga Perda Kabupaten Kuantan Singingi No 04 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan.
8	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan?	Masyarakat kelurahan pasti ikut juga berpartisipasi dalam menjaga kebersihan. Untuk kekuatannya kami juga belum tahu, karena belum ada kesempatan untuk meninjau langsung ke kelurahan.
9	Ada ga keluhan tersendiri dari pemerintah Kelurahan Benai mengenai persampahan disana?	Untuk saat ini belum ada keluhan apapun dari kecamatan benai ataupun kelurahan benai itu sendiri.

C.

### A. Identitas Informan Kecamatan Benai

1. Nama : Faizal Indra
2. Jabatan : Sekretaris Camat Benai

No	Pertanyaan (Kecamatan Benai)	Jawaban
1	Bagaimana pengelolaan persampahan di Kelurahan Benai?	Pengelolaan persampahan di Kelurahan Benai belum maksimal karena belum ada ketersediaan tong-tong sampah oleh pemerintah. Namun, kegiatan kebersihan untuk lingkungan tetap dijalankan walaupun belum maksimal tadi
2	Apakah pemerintah menyediakan pewadahan sampah (tempat sampah) untuk warga Kelurahan Benai?	Pada tahun 2017 pernah pemerintah menyediakan pewadahan persampahan seperti tong sampah yang terbuat dari bekas drum plastic. Namun seiring berjalannya waktu tong sampah yang ada banyak yang rusak dan juga hilang. Seharusnya setiap tahun ada pengadaan pewadahan persampahan tersebut.
2	Dengan pewadahan yang ada apakah sudah cukup untuk menampung timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.	Pastinya belum. Karena Sekarang masalah utamanya ketersediaan tong sampah ini yang kurang di Kelurahan Benai. Selain itu, pemerintah menyediakan pewadahan hanya di titik-titik tertentu saja bias dikatakan tidak merata.
3	Apakah pemerintah menyediakan prasarana pengumpulan sampah?	Iya ada. Ada 2 TPS yang disediakan pemerintah yang terbuat dari batu bata yang di plester selain itu TPS tersebut sudah $\pm$ 5 tahun umurnya. Kondisi TPS ini sudah mulai rusak dan pecah-pecah dan juga TPS ini tidak dapat menampung sampah yang ada. Sehingga banyak sampah yang berserakan di luar TPS yang mengakibatkan pemandangan yang kurang menarik dan menimbulkan bau busuk yang membuat tidak nyaman ketika melewati TPS tersebut.
4	Apa saja alat angkut yang digunakan dan berapa jumlah alat angkut yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk membuang atau mengambil sampah di TPS Kelurahan Benai? Dan berapa besaran timbulan sampah sekali angkut nya?	Sistem pengangkutan sampah di Kelurahan Benai dilakukan 2 kali seminggu, setiap hari pasar. Alat angkut yang digunakan pemerintah untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA adalah drum truck. Frekuensi pengangkutanya juga rutin tapi kalobisa lebih ditingkatkan lagi agar persampahan di TPS tersebut tidak mengendap terlalu lama. Untuk besaran timbulan sekali angkut kami belum tau pasti, karena pemerintah tidak memberikan data timbulan sampah yang telah diangkut ke TPA. Kondisi armada pengangkutan baik, tetapi masih ada kekurangan.
5	Bagaimana retribusi persampahan di Kelurahan Benai?	Untuk retribusi/iuran kami juga tidak tahu menau, mungkin pertanyaan ini akan dijawab oleh orang kelurahan nantinya.

3.

6	<p>Apa saja lembaga atau instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan persampahan di Kelurahan Benai?</p>	<p>Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan persampahan adalah Dinas Lingkungan Hidup. Dimana di dukung juga oleh kami selaku Kecamatan Benai.</p>
7	<p>Apakah ada peraturan atau hukum yang mengatur tentang persampahan di Kelurahan Benai?</p>	<p>Tentu ada peraturan yang mengelola persampahan. Seperti Perda Kabupaten Kuantan Singingi no 04 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan</p>
8	<p>Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan</p>	<p>Masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan. Seperti dalam 2xsetahun kecamatan mengadakan gotong royong di masing-masing kelurahan di kecamatan benai dan terlihat partisipasi masyarakatnya baik.</p>
9	<p>Ada ga keluhan tersendiri dari pemerintah Kelurahan Benai mengenai persampahan disana?</p>	<p>Kemarin ada perihal ketersediaan pewadahan sampah. Warga kelurahan benai menginginkan pengadaan pewadahan persampahan masing-masing di depan rumah para penduduk. Dan juga untuk penduduk yang tinggal jauh dari TPS mengeluhkan karena terlalu jauhnya TPS yang ada sehingga mereka membuat 1 lahan untuk Tempat Pembuangan Sampah untuk mereka. Hal tersebut juga dikeluhkan masyarakat karena sebagian masyarakat merasa terganggu dengan adanya lahan yang dibuat untuk tempat pembuangan sampah.</p>

## B. Identitas Informan Kecamatan Benai

1. Nama : Andi Kriastian, S.Sos
2. Jabatan : Kepala Lurah Kelurahan Benai

No	Pertanyaan (Kelurahan Benai)	Jawaban
1	Bagaimana pengelolaan persampahan di Kelurahan Benai?	Pengelolaan sampah dilakukan pengumpulan secara langsung oleh petugas kebersihan kemudian diangkut menggunakan mobil operasional pengangkutan sampah yang telah disediakan pemerintah
2	Apakah pemerintah menyediakan pewadahan sampah (tempat sampah) untuk warga Kelurahan Benai?	Untuk saat ini, pemerintah tidak menyediakan pewadahan sampah seperti tong sampah. Dulu ada, namun sudah beberapa tahun yang lalu dan kondisi pewadahan sampah yang ada juga banyak yang rusak dan juga banyak yang hilang. Kebanyakan warga kelurahan benai ini sendiri menyediakan pewadahan sampah mereka sendiri. Namun hal tersebut juga tidak semua warga yang mampu menyediakan pewadahan sampah ini karena itu banyak dari warga kelurahan benai ini menggunakan kantong plastic sebagai pewadahan lalu dibuang ke TPS atau tempat pembuangan sampah yang berada di dekat mereka.
2	Dengan pewadahan yang ada apakah sudah cukup untuk menampung timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.	Untuk pewadahan yang disediakan pemerintah tadi, pastinya jauh dari kata cukup.
3	Apakah pemerintah menyediakan prasarana pengumpulan sampah?	Pemerintah menyediakan 2 TPS di pasar benai guna untuk pengumpulan sampah, namun untuk warga atau penduduk Kelurahan benai yang tinggal jauh dari TPS tersebut membuat tempat pembuangan sampah sendiri. Ada juga yang membuang di tepi sungai ini, dan ditepi jalan. Hal tersebut berdampak negative.
4	Apa saja alat angkut yang digunakan dan berapa jumlah alat angkut yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk membuang atau mengambil sampah di TPS Kelurahan Benai? Dan berapa besaran timbulan sampah sekali angkut nya?	Alat angkut yang digunakan untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPA adalah dump truck. Untuk system pengangkutan sampah ini hanya 2 kali seminggu menurut kami sangat belum optimal yang akan mengakibatkan sampah-sampah yang timbul setiap hari akan semakin menumpuk.

5	Bagaimana retribusi persampahan di Kelurahan Benai?	Dinas lingkungan hidup selaku penanggung jawab dalam pengelolaan persampahan di Kelurahan Benai mengadakan pemungutan iuran retribusi kebersihan persampahan, yang akan dipungut oleh pihak kelurahan yang bertugas.
6	Apa saja lembaga atau instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan persampahan di Kelurahan Benai?	Lembaga yang bertanggung jawab terhadap persampahan adalah dinas lingkungan hidup. Dimana dinas lingkungan hidup memiliki personil untuk menyediakan, mengangkut, dan mengelola persampahan disini. Dan juga kami sebagai kantor kelurahan benai juga berpartisipasi dalam pengelolaan persampahan tentunya.
7	Apakah ada peraturan atau hukum yang mengatur tentang persampahan di Kelurahan Benai?	Peraturan yang mengatur tentang persampahan di kelurahan benai setau saya belum ada. Namun untuk peraturan dalam pemungutan iuran retribusi kebersihan persampahan memakai Perda Kabupaten Kuantan Singingi No 04 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
8	Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan	Partisipasi masyarakat di Kelurahan Benai baik.
10	Ada ga keluhan tersendiri dari pemerintah Kelurahan Benai mengenai persampahan disana?	Keluhan dari masyarakat sendiri sudah banyak ya, terutama untuk penyediaan tong sampah da nada juga di RW 3 minta untuk dibuatkan TPS atau container sampah. Karena RW 3 tersebut banyak terdapat penumpukan-penumpukan sampah di tepi jalan, selokan, atau rawa-rawa dipinggir jalan

A. Informan masyarakat

1. Nama : Yulisman
2. Jabatan : Ketua Lingkungan Kelurahan Benai

No	Pertanyaan (Kelurahan Benai)	Jawaban
1	Bagaimana pengelolaan persampahan di Kelurahan Benai?	Sampah yang telah dikumpulkan dibuang secara langsung tidak dilakukan pengelolaan seperti pemilihan, daur ulang sampah atau sebagainya. Karena, masih kurangnya fasilitas yang ada dalam pengelolaan sampah tersebut. Sehingga sampah-sampah yang telah dikumpulkan dibuang secara langsung dibiarkan begitu saja tanpa adanya pengelolaan dan apabila sampah ditempat pembuangan telah menumpuk maka akan dilakukan pembakaran sampah untuk mengurangi penumpukan tersebut.
2	Apakah pemerintah menyediakan pewadahan sampah (tempat sampah) untuk warga Kelurahan Benai?	Tidak, kami belum pernah menerima bantuan apapun dalam pengelolaan persampahan dari pemerintah pusat maupun pemerintah kecamatan itu sendiri.
3	Tempat pembuangan sampah bapak/ibu dirumah menggunakan pewadahan apa	Saya tidak menggunakan pewadahan karena akan menambah biaya yang keluar. Kami membuang sampah di depan rumah dan setelah menumpuk kami bakar.
4	Dengan pewadahan yang ada apakah sudah cukup untuk menampung timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.	Pastinya tidak cukup ya, bisa dilihat sendiri bagaimana kondisi persampahan di lingkungan kami
5	Apakah pemerintah menyediakan prasarana pengumpulan sampah?	Iya ada. Ada 2 TPS yang disediakan pemerintah yang terbuat dari batu bata yang di plester selain itu TPS tersebut sudah $\pm$ 5 tahun umurnya. Kondisi TPS ini sudah mulai rusak dan pecah-pecah dan juga TPS ini tidak dapat menampung sampah yang ada. Sehingga banyak sampah yang berserakan di luar TPS yang mengakibatkan pemandangan yang kurang menarik dan menimbulkan bau busuk yang membuat tidak nyaman ketika melewati TPS tersebut.
6	Apa saja alat angkut yang digunakan dan berapa jumlah alat angkut yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk membuang atau mengambil sampah di TPS Kelurahan Benai? Dan berapa besaran timbulan sampah sekali angkut nya?	Alat angkut yang digunakan pemerintah adalah dump truck. Frekuensi pengangkutan nya dilakukan jarang, dalam 1 minggu itu, kadang diangkut kadang juga ada tidak pengangkutan sampah. Sehingga sampah-sampah di TPS semakin hari-semakin banyak dan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap.

7	Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai lahan kosong yang dijadikan tempat pembuangan sampah?	Kami tahu membuang sampah disini tidak boleh dan mengganggu pemandangan dan kenyamanan masyarakat yang melewati jalan ini, tetapi kami bingung mau membuang sampah kemana lagi karena TPS terlalu jauh untuk dijangkau dan pemerintah juga tidak menyediakan TPS di sekitar sini
8	Apakah bapak/ibu tau mengenai peraturan pengelolaan persampahan?	Kami tidak mengetahui nya karena pemerintah daerah jarang memberikan wejangan tentang sampah di sini.